

**PENGARUH JUMLAH KEPEMILIKAN SERTIFIKAT AUDIT RSPO DAN ISPO
DENGAN IKLIM INVESTASI PENANAMAN MODAL ASING SUB SEKTOR
INDUSTRI MINYAK KELAPA SAWIT**

Disusun Oleh:

Nelda Bulan Porari Br Ginting

NIM. 145020301111006

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih

Derajat Sarjana Ekonomi



JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2018

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PENGARUH JUMLAH KEPEMILIKAN SERTIFIKAT AUDIT RSPO DAN ISPO
DENGAN IKLIM INVESTASI PENANAMAN MODAL ASING SUB SEKTOR
INDUSTRI MINYAK KELAPA SAWIT**

Yang disusun oleh:

Nama : Nelda Bulan Porari Br Ginting

NIM : 145020301111006

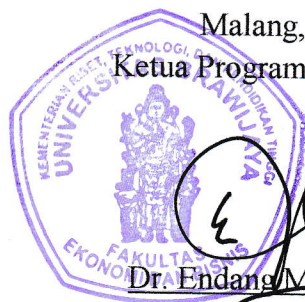
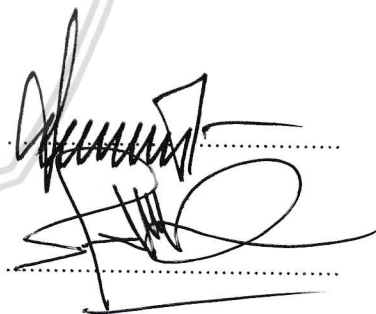
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 23 Mei 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Prof. Dr. Made Sudarma, SE., MM., CPA., Ak.
NIP. 19570709 198303 1 001
(Dosen Pembimbing)
2. Dr. Aji Dedi Mulawarman, SP., MSA.
NIP. 19691231 200912 1 002
(Dosen Penguji)



Malang, 23 Mei 2018
Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Endang Mardiaty, M.Si., Ak.

NIP. 19590902 198601 2 001

**PENGARUH JUMLAH KEPEMILIKAN SERTIFIKAT AUDIT RSPO
DAN ISPO DENGAN IKLIM INVESTASI PENANAMAN MODAL ASING
SUB SEKTOR INDUSTRI MINYAK KELAPA SAWIT**

Oleh : Nelda Bulan Porari Br Ginting

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Made Sudarma, SE., MM., CPA., Ak.

ABSTRAK

Penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Jumlah Kepemilikan Sertifikat Audit RSPO dan ISPO dengan Iklim Investasi Penanaman Modal Asing Sub Sektor Industri Minyak Kelapa Sawit”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan sertifikat audit RSPO dan ISPO terhadap penanaman modal asing sub sektor industri minyak kelapa sawit.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat *time series* dari tahun 2008 – 2017. Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis regresi berganda yang berfungsi untuk membuktikan hipotesis penelitian, dimana variabel kepemilikan sertifikat audit RSPO dan ISPO sebagai variabel independen. Seluruh data dianalisis dengan menggunakan program SPSS versi 23.

Hasil analisis uji simultan menunjukkan bahwa kepemilikan sertifikat RSPO dan ISPO tidak berpengaruh terhadap iklim investasi penanaman modal asing sub sektor industri minyak kelapa sawit. Penelitian uji parsial menunjukkan bahwa kepemilikan sertifikat audit RSPO tidak berpengaruh secara parsial terhadap penanaman modal asing sub sektor industri minyak kelapa sawit. Sedangkan, kepemilikan sertifikat audit ISPO berpengaruh dan memiliki arah hubungan positif terhadap penanaman modal asing sub sektor industri minyak kelapa sawit. Variabel kepemilikan sertifikat audit ISPO memiliki pengaruh yang dominan terhadap penanaman modal asing sub sektor industri minyak kelapa sawit.

Kata Kunci : Audit, Sertifikat RSPO, Sertifikat ISPO, Iklim Investasi, Penanaman Modal Asing, Minyak Kelapa Sawit.

**THE EFFECT OF TOTAL OWNERSHIP OF RSPO AND ISPO
AUDITING CERTIFICATE WITH FOREIGN INVESTMENT CLIMATE
SUB-SECTOR OF PALM OIL INDUSTRY.**

By Nelda Bulan Porari Br Ginting

Supervisor: Prof. Dr. Made Sudarma, SE., MM., CPA., Ak.

ABSTRACT

This study entitled "The Effect of Total Ownership of RSPO and ISPO Auditing Certificate with Foreign Investment Climate Sub-Sector of Palm Oil Industry". This study aims to determine the effect of the ownership of the RSPO and ISPO audit certificates with foreign investment sub-sectors of the palm oil industry.

The data used in this research is secondary data that is *time series* which comprised from the year 2008 - 2017. The analytical method used to analyze the data is multiple regression analysis and the function is to prove the hypothesis of the study, which the ownership of auditing certificate variables, RSPO and ISPO stands as an independent variable. All data were analyzed using the 23rd version of SPSS.

The results of the simultaneous test analysis showed that the RSPO and ISPO certificate of ownership has no effect on the investment climate sub-sector foreign investment of palm oil industry. Partial test research shows that ownership does not affect the RSPO audit certificate partially on foreign investment sub-sectors of the palm oil industry. Meanwhile, ownership of the audit certificate ISPO is found influential and have a positive relationship to the direction of foreign investment sub-sectors of the palm oil industry. The of ISPO auditing certificate's ownership variables have a dominant influence on foreign investment sub-sectors of the palm oil industry.

Keywords: Auditing, RSPO Certificate, Certificate of ISPO, Investment Climate, Foreign Investment, Palm Oil.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Yesus Kristus atas hikmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“PENGARUH JUMLAH KEPEMILIKAN SERTIFIKAT AUDIT RSPO DAN ISPO DENGAN IKLIM INVESTASI PENANAMAN MODAL ASING SUB SEKTOR INDUSTRI MINYAK KELAPA SAWIT”**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada

1. Prof. Dr. Made Sudarma, SE., MM., CPA., Ak. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Endang Mardiaty, M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi S1 Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dr. Aji Dedi Mulawarman, SP., MSA. selaku dosen penguji 1 (satu) yang telah banyak membantu memberikan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
4. Bapak dan Ibu dosen selama 3 tahun memberikan pelajaran di kelas, terimakasih atas ilmunya Pak dan Bu.
5. Bapak Serasi Ginting dan Ibu Pinta Malem Br Tarigan karena sudah membawa dalam doa segala pergumulan dan berusaha untuk mengerti menempatkan waktu yang tepat untuk menceritakan masalah.
6. Bapak dan Ibu Gembala Pdt. Riswan Tarigan, MTh dan Ida Martini Panggabean, MTh serta seluruh jemaat GJAI Km. 15 Perawang atas doanya.
7. Brema Arapenta Tarigan atas pengertian dan waktu yang diberikan untuk sekedar menemani pengerjaan skripsi dari video call, makasi WhatsApp mendekatkan kami yang LDR, walaupun akhirnya ditinggal tidur ya bang!
8. Eben Haizer, Eli Ezer, Zypora, adek adek kandung aku, kalian terlalu banyak nuntut ah. Samuel dan Enda sepupu di Malang atas pengertian dan waktu kalian. Rachel, Anggi dan Yolanda yang udah aku anggap adek sendiri atas segala bantuan kalian.

9. Adek-adek KTB ku yang terus memberikan semangat, Ovia, Anggita, Olivia, Sarah, Christine, Gracia.
10. Factor 2015-2016 (Econ, Billy, Dinda, Ronald, Aci) juga Factor 2016-2017 (Billy lagi, Alex, Yosi) atas pengalaman berharga yang mendewasakan. Datang ke nikahan ku woi!
11. Seluruh pengurus dan anggota PMK Maleakhi yang menemani 4 tahun ku di Malang, keluarga pertama di Malang, kepercayaannya melibatkan aku dibanyak acara, I will miss you!
12. Teman wacana tok. Jeni kawan sekamar, Erta kawan menggila, Yosi teman dunia maya aku. I love you. Udah gitu aja.
13. Teman-teman yang aku dekat dan yang aku kenal, pernah sekelas, sepanitian, saling sapa, siapa pun kalian, sampai jumpa di kesuksesan masing-masing ya.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Investasi dalam bentuk penanaman modal asing (PMA) diyakini sangat potensial dalam mempercepat pertumbuhan dan transformasi ekonomi. Upaya menarik investor asing untuk menanamkan investasinya di Indonesia sampai saat ini masih merupakan salah satu agenda pemerintah khususnya investasi asing yang bersifat langsung (*Foreign Direct Investment*) yang mana FDI memiliki pertalian ekonomi yang erat dengan Indonesia (Rahayu, 2005).

Penanaman modal asing telah dilakukan sejak Pemerintahan Belanda dengan pihak investor asing seperti perusahaan Stanvac, British American Tobacco, Phillips, Mantrust, dan perusahaan lainnya termasuk perusahaan perkebunan. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia lalu meneruskan perjanjian-perjanjian tersebut. Di Pemerintahan Orde Baru, Indonesia lalu mengeluarkan peraturan pertama mengenai Penanaman Modal Asing yaitu Undang-undang No. 1/1967. (Kartasapoetra, 2001, hal. 124)

Pada saat Pemerintahan Belanda, perkebunan-perkebunan di Indonesia sangatlah diminati sebagai tempat penanaman modal. Hal ini diyakini karena Pemerintah Belanda berhasil menjual tanah kepada pihak partikelir untuk menutupi kekurangan uang yang sedang dialami Pemerintah Belanda. Pihak partikelir yang dimaksud adalah pengusaha dari Cina dan Eropa menggunakan lahan tersebut untuk menanam komoditas perkebunan lalu mendirikan pabrik-

pabrik. Selain dengan menjual lahan, digunakan juga sistem persewaan desa dengan para bupati. Sistem ini mewajibkan bupati untuk menyerahkan lahan kekuasaannya untuk disewakan kepada pihak pengusaha luar negeri. (Mubyarto, 1992, hal. 17).

Komoditas perkebunan yang diminati oleh negara lain pada awalnya adalah rempah-rempah seperti cengkeh, lada, jahe, kapulaga, kunyit, pala, kayu manis dan adas. Seiring berjalannya waktu, muncul komoditas perkebunan lain yang diminati juga seperti tebu, karet, kopi, teh dan tanaman keras lainnya dengan diterapkannya sistem tanam paksa. Tanam paksa juga secara tidak langsung mengenalkan kepada rakyat Indonesia suatu teknologi baru dalam bidang pertanian dan biji-biji tanaman perdagangan.

Tabel 1.1: Laju Pertumbuhan Luas Area Perkebunan

| No | Komoditas | Tahun | | | Pertumbuhan |
|----|--------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1 | Karet | 3.621.102 | 3.639.092 | 3.672.123 | 0,50 |
| 2 | Kelapa | 3.585.599 | 3.566.103 | 3.544.393 | -0,54 |
| 3 | Kelapa Sawit | 11.260.277 | 11.914.499 | 12.307.677 | 5,81 |
| 4 | Kopi | 1.230.001 | 1.228.512 | 1.227.787 | -0,12 |
| 5 | Teh | 114.891 | 117.268 | 118.252 | 2,07 |
| 6 | Lada | 167.590 | 168.080 | 167.626 | 0,29 |
| 7 | Cengkeh | 535.694 | 542.281 | 542.450 | 1,23 |
| 8 | Kakao | 1.709.284 | 1.701.351 | 1.691.334 | -0,46 |
| 9 | Jambu Mete | 522.863 | 515.348 | 515.250 | -1,44 |
| 10 | Tebu | 454.171 | 445.520 | 453.456 | -1,90 |
| 11 | Tembakau | 209.095 | 206.337 | 206.514 | -1,32 |
| 12 | Kapas | 6.118 | 5.919 | 5.686 | -3,25 |
| 13 | Nilam | 18.626 | 18.562 | 18.592 | -0,34 |
| 14 | Pala | 168.904 | 169.285 | 169.587 | 0,23 |

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan 2016

Data yang didapatkan dari Direktorat Jendral Perkebunan diatas memperlihatkan adanya naik turun dari luas area perkebunan. Rempah-rempah ternyata tidak menunjukkan pertumbuhan yang cukup besar. Kopi dan Tebu ternyata menunjukkan angka negatif, padahal pada masa perkebunana awal, rempah-rempah, kopi dan tebu adalah komoditas prioritas. Pertumbuhan terbesar adalah pertumbuhan luas area perkebunan kelapa sawit. Hal ini menunjukkan ketertarikan terhadap kelapa sawit sangatlah positif.

Perkebunan sawit milik rakyat pada tahun 2005 telah mencapai 2.220.338 Ha dan terus meningkat sampai 4.575.101 Ha pada tahun 2015. Provinsi dengan luas area perkebunan rakyat terluas adalah Riau yaitu 1.357.819 Ha dan tersempit adalah Jawa Barat yaitu 259 Ha. Perkebunan Besar Negara pada 2005 mencapai luas 677.792 Ha lalu meningkat sampai 750.160 Ha pada 2015 dan Sumatera Utara sebagai Provinsi dengan lahan terluas mencapai 315.009 Ha lalu Kalimantan Tengah dengan luas 700 Ha sebagai lahan tersempit. Perkebunan besar swasta pada 2005 mencapai 2.915.634 Ha lalu pada 2015 mencapai 11.300.370 Ha. Provinsi Kalimantan Tengah adalah perkebunan swasta terluas yaitu 974.324 Ha dan Sulawesi Selatan adalah penyedia lahan tersempit yaitu 2.518 Ha. (BPS, 2015, hal. 18)

Dengan peningkatan luas lahan untuk perkebunana kelapa sawit, maka semakin luas juga lahan baru yang telah dibuka. Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit mendapat perhatian khusus oleh pemerintah dan organisasi internasional karena dianggap merusak lingkungan, mengurangi jumlah hutan, dan mengancam habitat orang utan.

Adanya kesadaran akan kesehatan lingkungan, maka dibuatlah suatu standar internasional dan nasional bagi perusahaan sawit agar memproduksi minyak sawit berkelanjutan. Hal ini menjadi sesuatu yang serius bahkan bagi importir minyak kelapa sawit dari berbagai negara. Importir serius dalam memilih minyak kelapa sawit yang akan dipilih, yaitu minyak kelapa sawit berkelanjutan. Karena itu, dewasa ini banyak perusahaan kelapa sawit telah berkomitmen untuk mengikuti audit untuk mendapatkan sertifikat. Perusahaan yang telah diaudit sesuai dengan standar akan menerima sertifikat yang secara berkala disertifikasi kembali dengan cara melakukan audit oleh lembaga sertifikasi independen terhadap perusahaan-perusahaan kelapa sawit.

Sertifikasi internasional yang dilakukan perusahaan kelapa sawit secara sukarela adalah *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). WFF (2010) menyatakan bahwa adanya praktik manajemen yang baik dalam perkebunan kelapa sawit dapat membantu untuk menjaga hutan, spesies langka seperti orang utan, dan masyarakat yang hidup dari hasil hutan. John Sauven (2009) menyatakan bahwa menciptakan standar baru mengenai minyak kelapa sawit berkelanjutan merupakan hal yang baik untuk diikuti oleh perusahaan minyak kelapa sawit.

Diskriminasi minyak kelapa sawit dari Indonesia di pasar Uni Eropa akhirnya membuat pemerintah menyusun suatu kebijakan yaitu Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO). Kebijakan tersebut menjadi suatu kewajiban karena telah diterbitkan peraturan oleh Menteri Pertanian mengenai standar perusahaan kelapa sawit di Indonesia. Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Pertanian

Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Pemerintah menerbitkan peraturan tersebut karena sebelumnya terdapat isu negatif mengenai minyak kelapa sawit Indonesia di pasar Eropa. Oleh karena itu, Bayu Krisnamurthi dalam majalah Gatra (2014) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang mewajibkan sertifikasi berkelanjutan pertama di dunia untuk perusahaan kelapa sawit, Indonesia dirasa paling siap mengenai perkebunan sawit berkelanjutan.

Keperdulian perusahaan akan lingkungan dan sosial tentu menjadi nilai tambah yang dilihat oleh investor untuk menanamkan modal karena selain keuntungan perusahaan, investor juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan juga tidak ingin menanggung risiko jika perusahaan penerima modal ternyata melakukan kelalaian akan lingkungan dan sosial.

Perusahaan kelapa sawit memiliki pilihan untuk menunjukkan kepada investor bahwa perusahaan kelapa sawit peduli akan lingkungan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perusahaan dapat memilih salah satu, atau juga lebih cara audit yang dirasa penting. Sertifikasi RSPO bersifat sukarela dan bertaraf internasional merupakan sertifikasi dengan melakukan audit secara independen sedangkan sertifikasi ISPO merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan kelapa sawit di Indonesia karena diatur oleh Menteri Pertanian dan juga di audit secara independen.

Adanya pilihan cara yang berbeda untuk menunjukkan keperdulian akan lingkungan dan sosial oleh perusahaan kelapa sawit baik itu sukarela ataupun

diwajibkan, serta keinginan investor pemberi modal untuk tidak dirugikan karena kelalaian akan lingkungan dan sosial, maka penulis ingin meneliti pengaruh jumlah perusahaan bersertifikat RSPO dan ISPO dengan iklim investasi penanaman modal asing pada perusahaan kelapa sawit. Penelitian ini penulis beri Judul: **“Pengaruh Jumlah Kepemilikan Sertifikat Audit RSPO dan ISPO dengan Iklim Investasi Penanaman Modal Asing Sub Sektor Industri Minyak Kelapa Sawit”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh antara jumlah perusahaan yang memiliki sertifikat audit RSPO dan ISPO dengan iklim investasi penanaman modal asing pada sub sektor industri minyak kelapa sawit di Indonesia secara simultan?
2. Apakah terdapat pengaruh antara jumlah perusahaan yang memiliki sertifikat audit RSPO dan ISPO dengan iklim investasi penanaman modal asing pada sub sektor industri minyak kelapa sawit di Indonesia secara parsial?
3. Diantara jumlah perusahaan yang memiliki sertifikat audit RSPO dan ISPO, manakah yang paling berpengaruh dominan terhadap penanaman modal asing sub sektor industri minyak kelapa sawit di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh jumlah perusahaan yang memiliki sertifikat audit RSPO dan ISPO secara simultan terhadap penanaman modal asing pada sub sektor industri minyak kelapa sawit di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh jumlah perusahaan yang memiliki sertifikat audit RSPO dan ISPO secara parsial terhadap penanaman modal asing sub sektor industri minyak kelapa sawit di Indonesia.
3. Untuk mengetahui diantara jumlah perusahaan yang memiliki sertifikat audit RSPO dan ISPO manakah yang paling berpengaruh dominan terhadap penanaman modal asing sub sektor industri minyak kelapa sawit di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan dapat memberikan manfaat baik dibidang teoritis maupun dibidang praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Peneliti bertujuan mengembangkan penelitian dan pembelajaran mengenai penanaman modal asing dalam sub sektor industri minyak kelapa sawit di Indonesia yang merupakan salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Penelitian ini

diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang kesadaran akan lingkungan dengan kepemilikan sertifikat audit RSPO dan ISPO dan pengaruhnya terhadap penanaman modal asing di sub sektor industri minyak kelapa sawit.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah dan juga pengusaha kelapa sawit yang membutuhkan investasi dari penanaman modal asing. Peneliti mendeskripsikan akankah ikim investasi dari penanaman modal asing dipengaruhi sertifikat internasional RSPO tentang kesadaran akan kesehatan lingkungan secara sukarela dan sertifikat ISPO yang diwajibkan oleh pemerintah Indonesia tentang kesadaran dan kesehatan lingkungan. Hal ini tentu memberikan masukan bagi pemerintah mengenai peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu, membantu praktisi dalam memutuskan keputusan selanjutnya, seperti keputusan perusahaan untuk ikut serta dalam keperdulian lingkungan dengan memilih cara yang akan digunakan, atau keputusan investor dalam memilih perusahaan untuk diberikan modal.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini dijelaskan latar belakang pemilihan judul yang diangkat oleh peneliti. Didalamnya mengandung latar belakang,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan tinjauan pustaka yang digunakan peneliti sebagai bahan rujukan dan perbandingan. Selain itu, terdapat juga konsep-konsep yang berhubungan dengan audit sertifikat RSPO dan ISPO juga tentang penanaman modal asing.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang dilakukan peneliti sesuai dengan permasalahan atau tujuan penelitian. Hal-hal yang dicakup dalam bab ini adalah penjelasan tentang ruang lingkup penelitian, hubungan variabel-variabel penelitian dan definisi operasionalnya, metode pengumpulan data, dan model analisis yang akan digunakan peneliti.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya bab ini akan menjelaskan hasil dari penelitian yang telah dilakukan peneliti. Akan diuji apakah hipotesis peneliti dapat dipertahankan. Hasil akan dibahas sesuai dengan data yang telah tersedia atau data yang didapatkan sendiri.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan ada tiga pokok pikiran yang terdapat didalamnya. Pertama, kesimpulan atau uraian secara ringkas dan jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang diangkat peneliti. Kedua, keterbatasan penelitian dalam melakukan penelitian seperti kendala yang dihadapi peneliti. Ketiga, saran yang berisikan arahan kepada peneliti selanjutnya.



BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Teori Penanaman Modal Asing (PMA)

2.1.1 Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman modal asing telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 dalam Pasal 1 Ayat 9 Tentang Penanaman Modal, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Dari pengertian di atas, Ismail Sunny dan Rudiono Rochmat (1968) berpendapat bahwa Penanaman Modal Asing mengandung tiga unsur pokok yaitu:

1. Penanaman secara langsung
2. Penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan
3. Risiko yang langsung ditanggung oleh pemilik modal.

Menurut Salim dan Budi (2008: 149) penanaman modal asing merupakan transfer modal baik nyata maupun tidak nyata dari suatu negara ke negara lain untuk pemindahan modal. Tujuan pemindahan modal ini digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan dibawah pengawasan dari pemilik modal, baik total maupun sebagian.

Menurut Sumantoro (1987), bentuk badan hukum perusahaan multinasional dapat dibedakan menjadi 5, yaitu:

1. Perusahaan Cabang

Merupakan bagian yang terpisah dengan perusahaan multinasional induknya.

2. Perusahaan Subsidiary

Merupakan anak perusahaan yang berbadan hukum sendiri. Saham perusahaan ini sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan induknya.

3. Perusahaan Patungan

Merupakan perusahaan yang berkedudukan lokal dan sebagian sahamnya dipegang oleh masyarakat.

4. Perusahaan *Go Public*

Merupakan perusahaan yang berkedudukan lokal dan sebagian sahamnya dipegang oleh masyarakat.

5. Perusahaan dengan bentuk lain

Pembentukannya dapat didasarkan pada ketentuan perundangan yang ada, seperti di perbankan, pertambangan minyak dan gas bumi, perdagangan ataupun jasa lainnya.

Investasi asing dapat dibagi menjadi dua bentuk. Pertama, investasi portofolio yaitu investasi yang dibiayai oleh luar negeri tetapi dioperasikan oleh warga domestik. Investasi portofolio dilakukan melalui pasar modal dengan saham atau obligasi. Kedua, investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment / FDI*) atau dikenal dengan penanaman modal asing yaitu investasi modal yang dimiliki dan

dioperasikan oleh entitas luar negeri. Bentuk investasi ini seperti membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan yang ada di dalam negeri.

Penanaman modal asing tentu lebih bermanfaat bagi negara karena sifatnya permanen atau jangka panjang. Selain itu, perusahaannya tentu menyediakan teknologi terkini, keterampilan manajemen terbaik, dan memberikan kesempatan untuk bekerja bagi masyarakat dalam negeri. Penanaman modal asing juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara walaupun sebagian keuntungan akan disimpan oleh investor asing.

2.1.2 Teori Penanaman Modal Asing

Alan M. Rugman (1981), menyatakan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) dipengaruhi oleh variabel lingkungan dan variabel internalisasi. Adapun variabel lingkungan yang diperhatikan adalah ekonomi, non ekonomi, dan pemerintah. Variabel ekonomi dapat berupa tenaga kerja, modal, teknologi, sumber daya alam, dan keterampilan manajemen. Variabel non ekonomi dapat berupa politik, budaya, dan sosial. Variabel pemerintah dapat berupa aturan, insentif dan juga jaminan yang diberikan.

Jhon Dunning (1977) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Asing melalui teori ancangan eklektis. Teori eklektis menetapkan suatu set yang terdiri dari tiga persyaratan yang diperlukan bila sebuah perusahaan akan berkecimpung dalam Penanaman Modal Asing.

1. Keunggulan Spesifik Perusahaan.

Perusahaan harus memiliki keunggulan kepemilikan neto bila berhadapan dengan perusahaan berkebangsaan lain dalam melayani pasar tertentu (terutama pasar luar negeri). Rentang keunggulan untuk meningkatkan FDI adalah melalui teknologi pemilikan disebabkan karena kegiatan penelitian dan pengembangan, keterampilan manajerial, pemasaran, atau lainnya yang spesifik untuk fungsi organisasi perusahaan, deferensiasi produk, merk dagang atau nama cap, dan keperluan modal yang besar untuk pabrik dengan ukuran efisien minimum.

2. Keunggulan Internalisasi

Kondisi yang mampu menyokong internalisasi adalah dengan biaya tinggi dalam membuat dan melaksanakan kontrak, ketidakpastian pembeli tentang nilai teknologi yang dijual, kebutuhan untuk mengendalikan penggunaan atau penjualan kembali produk, dan keunggulan untuk menggunakan deskriminasi harga atau subsidi ulang (*cross-subsidization*)

3. Keunggulan Spesifik Negara

Keunggulan spesifik lokasi dari negara tuan rumah dapat meliputi sumber daya alami, kekuatan tenaga kerja biaya rendah yang efisien dan terampil, dan rintangan perdagangan membatasi impor.

Menurut David K. Eiteman (1989), motif yang mendasari penanaman modal asing ada tiga, yaitu: motif strategi, motif perilaku dan motif ekonomi.

Dalam motif strategi dibedakan menjadi mencari pasar, bahan baku, efisiensi produk, pengetahuan, dan keamanan politik. Sedangkan motif perilaku merupakan rangsangan lingkungan eksternal dan yang lain dari organisasi didasarkan pada kebutuhan dan komitmen individu atau kelompok. Motif ekonomi merupakan motif untuk mencari keuntungan dengan cara memaksimalkan keuntungan jangka panjang dan harga pasar saham perusahaan.

Proses administrasi asing di Indonesia baik sebagian ataupun sepenuhnya secara umum dapat diringkas seperti berikut:

TAHAP PERTAMA: TAHAP PERSIAPAN

Tahap ini adalah tahap mengajukan permohonan kepada BPKM tentang rencana penanaman modal asing dan dapat langsung mengurus izin. Sedangkan hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah data dari calon investor PMA seperti informasi bisnis yang akan dijalankan, modal yang akan diinvestasikan, rencana produksi, proyeksi omzet, jumlah tenaga kerja dan nama-nama pemegang saham dari calon perusahaan PMA. Bila permohonan rencana PMA diterima, BKPM akan mengeluarkan izin prinsip (IP), yang menjadi dasar untuk mengimplikasikan permohonan rencana PMA.

TAHAP KEDUA: TAHAP KONSTRUKSI

Pada tahap ini, dapat direalisasikan izin prinsip yang telah didapatkan seperti mendirikan PT. PMA sesuai aturan pemerintah dan melengkapi dokumen yang akan dibutuhkan. Selain itu, pada tahap ini juga dapat

diajukan permohonan pembebasan pajak bagi perusahaan yang menurut aturan dapat menerima fasilitas pembebasan pajak atas mesin-mesin yang diperlukan untuk menghasilkan produk dari PT. PMA.

TAHAP KETIGA: TAHAP OPERASI

Jika tahap kedua sudah rampung, maka dapat dikatakan perusahaan sudah siap 85% untuk beroperasi. Selanjutnya pada tahap ini akan diajukan permohonan izin usaha tetap (IUT). Dokumen yang telah disiapkan pada tahap kedua akan diserahkan ke BKPM. Setelah dinyatakan lengkap, maka BKPM akan menerbitkan izin usaha tetap.

Penanaman modal asing dilakukan di sektor-sektor yang produksinya belum mencapai kebutuhan dalam negeri atau sektor-sektor yang memperluas ekspor dengan memperhatikan kepentingan rakyat dan berkembangnya perusahaan-perusahaan nasional. Penanaman modal asing disertai syarat-syarat untuk membuka kesempatan kerja yang cukup besar, memungkinkan pengalihan keterampilan teknologi kepada bangsa-bangsa Indonesia dalam waktu secepatnya memelihara keseimbangan kualitas tata lingkungan dan diarahkan agar mendukung tujuan pembangunan serta memperkuat tumbuhnya ekonomi nasional (UUD 1945, P 4, GBHN, hal. 35)

Terdapat dua kategori bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing, yaitu:

1. Tertutup bagi Penanaman Modal Langsung

Pelabuhan, produksi, transmisi, dan distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkit tenaga atom, mass media, kesemua bidang-bidang ini tertutup untuk penanaman modal asing secara pengusaha penuh karena merupakan bidang-bidang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak.

2. Tertutup sama sekali bagi penanaman modal asing

Produksi senjata, mesiu, alat-alat peledak, dan peralatan perang, bidang-bidang ini menduduki peranan penting dalam pertahanan negara (Kertasapoetra, 1985, hal. 95).

2.2 Audit Lingkungan

2.2.1 Pengertian Audit Lingkungan

Menurut Kep. Men.LH 42/1994, Audit lingkungan adalah suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematis, terdokumentasi, periodik dan obyektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi sistem manajemen dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian pemanfaatan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan.

2.2.2 Jenis-jenis Audit Lingkungan

Menurut IBK Bayangkara (2015: 428) terdapat tiga jenis audit lingkungan yang berbeda. Tujuan dan ruang lingkupnya sering merupakan gabungan dari

beberapa jenis audit menyesuaikan dengan situasi yang terjadi. Jenis-jenis audit tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

1. Audit tanggung jawab lingkungan

Audit ini sering dilakukan sebagai pendahuluan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kepatuhannya terhadap ketentuan dan peraturan lingkungan yang berlaku. Audit yang termasuk dalam kelompok audit ini adalah :

a. Audit kepatuhan

Merupakan audit yang paling umum dilakukan dalam audit lingkungan. Audit ini merupakan proses verifikasi terhadap tingkat kemampuan fasilitas dalam memenuhi ketentuan undang –undang lingkungan , peraturan , batas emisi,dan sebagainya.

b. Audit kewajiban resiko operasional

Berkonsentrasi pada kerusakan lingkungan sebagai konsekuensi dari aktivitas berbagai fungsi operasi. Kepatuhan terhadap peraturan tidak dapat mengurangi kewajiban yang seharusnya terhadap risiko operasional.

c. Audit keselamatan dan kesehatan kerja.

Merupakan bagian dari audit kesehatan dan keselamatan lingkungan, meliputi penilaian terhadap kecukupan alat pengamanan pekerja (alat keamanan kerja seperti sepatu , kacamata, helm dan sebagainya)

2. Audit manajemen lingkungan

Audit ini memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap sistem manajemen lingkungan yang diterapkan perusahaan sebagai pedoman bagaimana operasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Audit yang termasuk dalam kelompok audit ini adalah sebagai berikut.

a. Audit Perusahaan

Audit ini merupakan inisiatif dari manajemen puncak perusahaan induk dan memberikan perhatian terhadap struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab, implementasi kebijakan, kesadaran dan komunikasi. Hal ini memberikan kepastian kepada manajemen puncak bahwa tujuan dan sasarannya dapat terimplementasikan melalui struktur yang dimiliki oleh perusahaan.

b. Audit Sistem

Melakukan pengujian terhadap perbedaan antara sistem dengan kebijakan dan standar-standar yang berlaku seperti ISO 14001

c. Audit kebijakan

Melakukan *review* dan menilai kembali relevansi kebijakan, mengingat perkembangan yang terjadi di dalam dan di luar perusahaan.

3. Audit aktivitas lingkungan

Audit ini mencakup penilaian terhadap permasalahan-permasalahan manajemen dan pemilihan teknik pengelolaan lingkungan. Audit yang termasuk dalam kelompok audit ini adalah sebagai berikut :

- a. Audit lingkungan lokasi pabrik
- b. Audit limbah
- c. Audit produk
- d. Audit lintas batas

2.3 Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) adalah asosiasi yang terdiri dari berbagai sektor industri kelapa sawit (perkebunan, pemrosesan, distributor, industri manufaktur, investor, akademisi, dan LSM bidang lingkungan) yang bertujuan mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk produksi minyak sawit berkelanjutan. RSPO didirikan pada tahun 2004 dengan pusat asosiasi di Zurich, Swiss, sekretariat berada di Kuala Lumpur, Malaysia dan memiliki kantor cabang di Jakarta. Sampai saat ini, RSPO telah memiliki 3000 anggota dari negara-negara penyuplai minyak kelapa sawit.

2.3.1 Visi dan Misi

Visi dari *Roundtable on Sustainable Palm Oil* adalah “Mengubah pasar untuk menjadikan minyak sawit berkelanjutan sebagai norma”

Misi dari *Roundtable on Sustainable Palm Oil* adalah:

- Memanfaatkan produksi, pengadaan, keuangan dan penggunaan produk minyak sawit berkelanjutan

- Mengembangkan, menerapkan, memastikan, dan meninjau secara berkala standar global yang kredibel untuk keseluruhan rantai pasokan minyak sawit berkelanjutan
- Memantau dan mengevaluasi dampak ekonomi, lingkungan dan sosial dari pengambilan minyak sawit berkelanjutan di pasar
- Melibatkan dan berkomitmen dengan semua pemangku kepentingan di seluruh rantai pasokan, termasuk pemerintah dan konsumen.

2.3.2 Prinsip dan Kriteria RSPO

Prinsip, Kriteria dan Indikator RSPO tahun 2017 dapat dilihat pada lampiran (LAMPIRAN 1) halaman 56.

2.4 Indonesia Sustainable Palm Oil

2.4.1 Pengertian Indonesia Sustainable Palm Oil

Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) adalah kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Pertanian untuk meningkatkan daya saing minyak kelapa sawit di pasar dunia. Selain itu, tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengurangi gas rumah kaca dan juga memberikan perhatian terhadap masalah lingkungan.

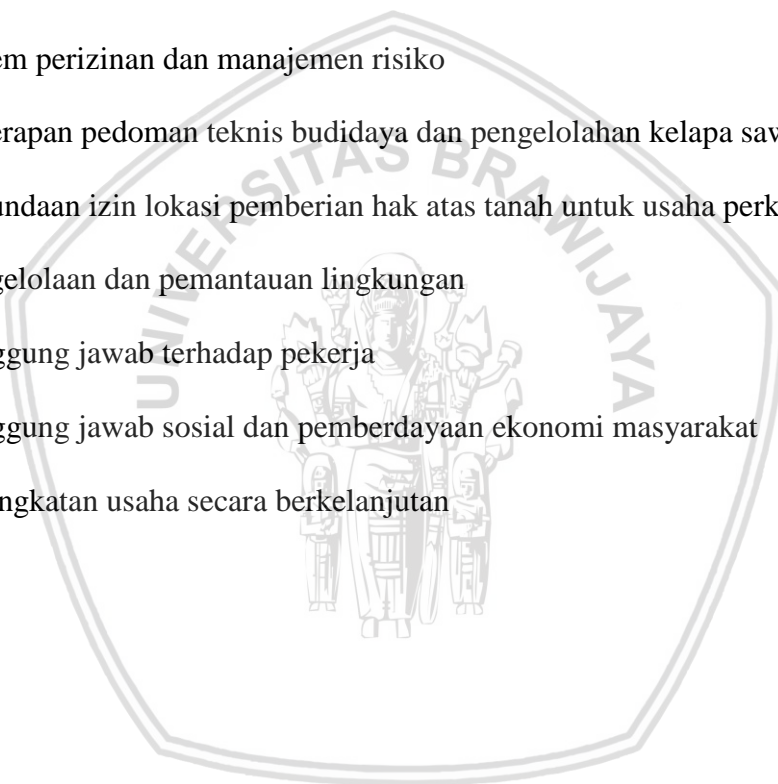
Tidak hanya sekedar sertifikasi, ISPO juga menjadi wadah dialog kerkelanjutan antara pemerintah, perusahaan perkebunan kelapa sawit, dan pihak-pihak lain yang terkait. Selain itu, ISPO juga menjadi syarat untuk perusahaan

eksportir minyak kelapa sawit. Perusahaan yang tidak memiliki sertifikat audit ISPO tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan ekspor.

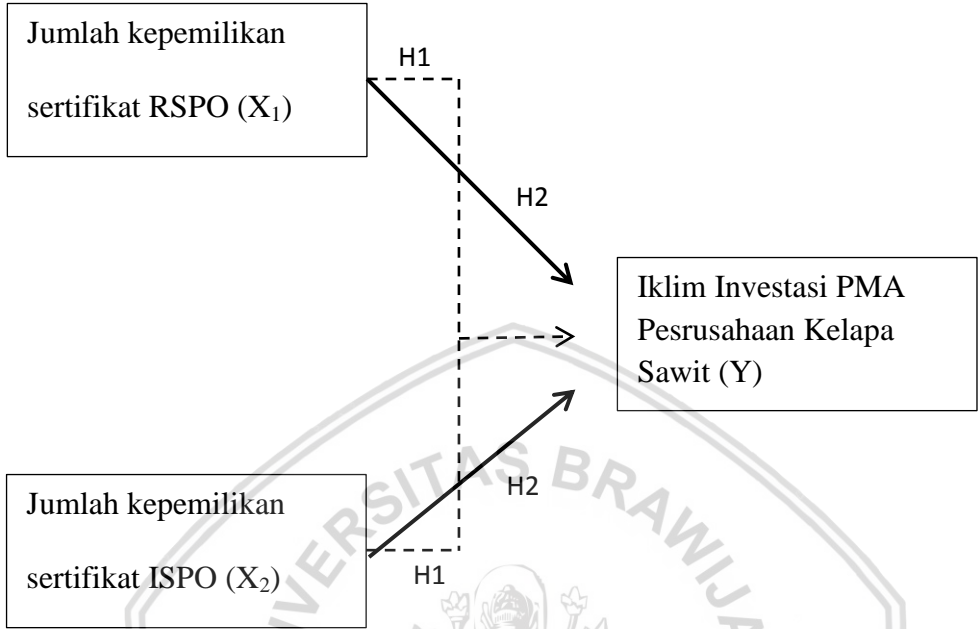
2.4.2 Persyaratan ISPO

Menurut Rosediana (2013), terdapat tujuh kriteria dalam ISPO yang tidak berbeda jauh dari kriteria dan prinsip RSPO, yaitu:

1. Sistem perizinan dan manajemen risiko
2. Penerapan pedoman teknis budidaya dan pengolahan kelapa sawit
3. Penundaan izin lokasi pemberian hak atas tanah untuk usaha perkebunan
4. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan
5. Tanggung jawab terhadap pekerja
6. Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
7. Peningkatan usaha secara berkelanjutan



2.6 Kerangka Konseptual



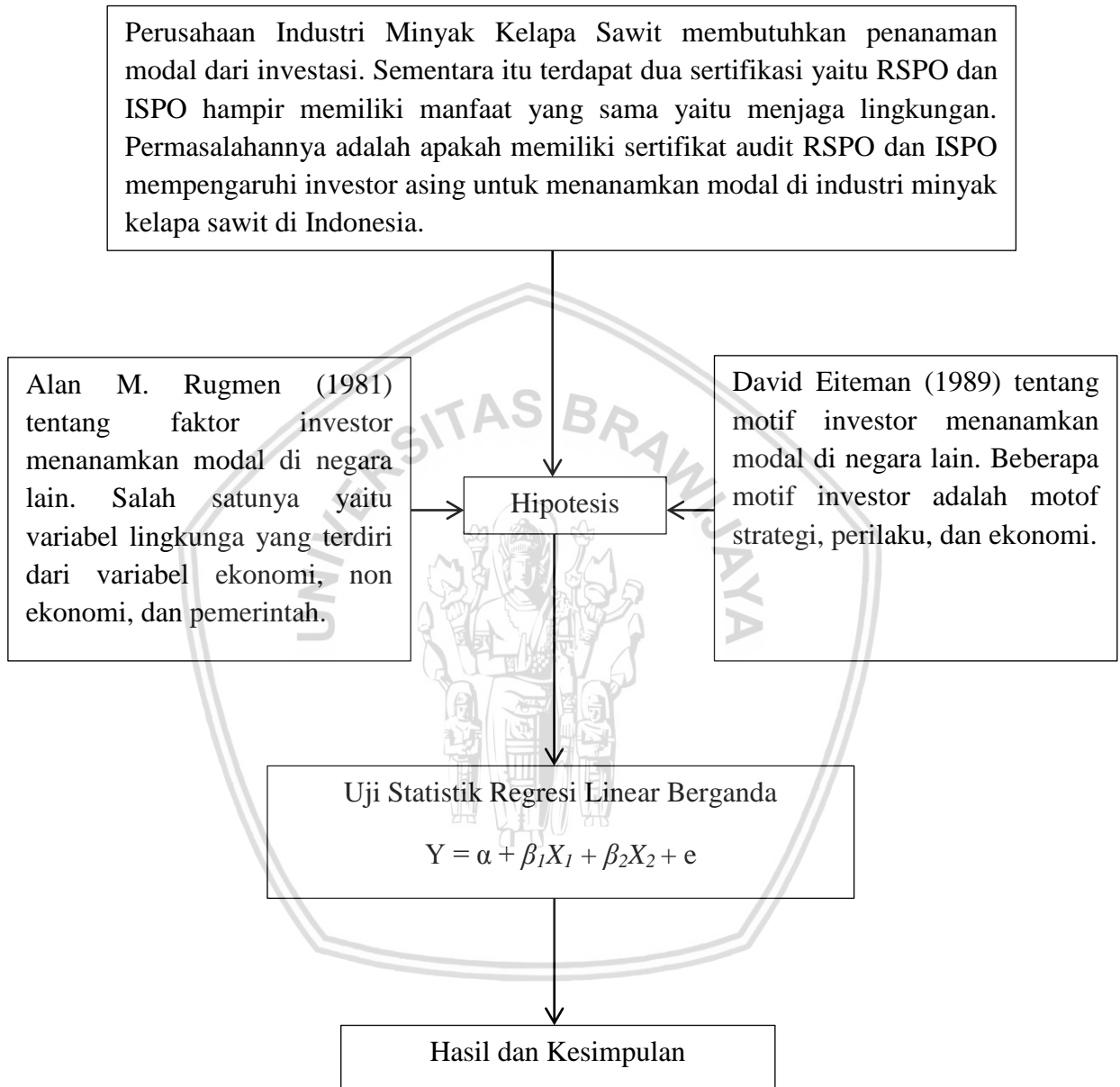
Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Keterangan:

-----> : secara simultan

—————> : secara parsial

2.7 Kerangka Pikir



Gambar 2.2

Kerangka Pikir

2.8 Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara (Hasan, 2008). Hipotesis merupakan pernyataan peneliti mengenai hubungan antara variabel yang mempengaruhi dengan variabel yang dipengaruhi di dalam penelitian. Maka dalam penelitian ini dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Jumlah kepemilikan sertifikat audit RSPO dan ISPO berpengaruh terhadap iklim investasi penanaman modal asing sub sektor industri minyak kelapa sawit secara simultan.

H2 : Jumlah kepemilikan sertifikat audit RSPO dan ISPO berpengaruh terhadap iklim investasi penanaman modal asing sub sektor industri minyak kelapa sawit secara simultan.

H3 : Jumlah kepemilikan sertifikat audit RSPO berpengaruh paling dominan dalam iklim investasi penanaman modal asing sub sektor industri minyak kelapa sawit dibandingkan variabel lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dimana di dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan ilmiah terhadap keputusan manajerial dan ekonomi. Pendekatan ini berangkat dari data yang kemudian data ini diproses dan dimanipulasi dengan informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan (Kuncoro, 2007, hal. 124)

3.2 Defenisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009, hal. 18). Penelitian ini memiliki variabel penelitian sebagai berikut:

3.2.1 Variabel Dependen (Y)

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah realisasi penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing dalam bentuk investasi langsung yang sudah terealisasi di sektor perkebunan kelapa sawit yang dinyatakan dalam mata uang dolar (USD).

3.2.2 Variabel Independen (X)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi (Wijaya, 2013, hal. 13).

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu:

a. Kepemilikan Serifikat Audit RSPO (X_1)

Sertifikasi RSPO realisasi secara sukarela oleh pengusaha kelapa sawit untuk membuktikan bahwa pengusaha tersebut peduli akan lingkungan tempat dimana usahanya didirikan. Dalam penelitian ini data dilihat dari jumlah kepemilikan sertifikat audit RSPO pengusaha kelapa sawit di Indonesia.

b. Kepemilikan Sertifikat Audit ISPO (X_2)

Sertififikasi ISPO merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan kelapa sawit yang di atur oleh Menteri Pertanian mengenai perkebunana berkelanjutan. Dalam penelitian ini data dilihat dari jumlah kepemilikan sertifikat audit ISPO pengusaha kelapa sawit di Indonesia.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah kumpulan dari semua orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain, yang menjadi objek perhatian. Sampel merupakan bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian (Suharyadi & Purwanto, 2015, hal. 6). Oleh karena itu, dalam penelitian ini populasi adalah seluruh data PMA perusahaan kelapa sawit, kepemilikan sertifikat audit RSPO dan ISPO oleh perusahaan dan

pemilik perkebunan kelapa sawit. Sampel dalam penelitian ini adalah data PMA pada industri minyak mentah kelapa sawit dan minyak goreng, jumlah kepemilikan sertifikat audit RSPO sejak 2008-2017, dan jumlah kepemilikan sertifikat audit ISPO sejak 2008-2017. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah sampel purposive, dimana penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu yang didasarkan pada kepentingan atau tujuan penelitian.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk runtut waktu (*time series*) pada tahun 2008-2017. Data sekunder yang digunakan antara lain:

- a. Data penanaman modal asing pada sub sektor industri minyak kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2008-2017, yang dinyatakan dalam Juta Rupiah (Sumber: BKPM)
- b. Data kepemilikan sertifikat audit RSPO oleh pengusaha-pengusaha kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2008-2017 (Sumber: RSPO)
- c. Data kepemilikan sertifikat audit ISPO oleh pengusaha-pengusaha kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2008-2017 (Sumber: Komisi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia)

3.5 Analisis Data

3.5.1 Model Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptis yang didasarkan pada penanaman modal asing yaitu dengan menganalisis kepemilikan sertifikat audit RSPO dan ISPO di Indonesia. Teknik analisis statistik yang digunakan adalah regresi berganda dengan program komputer SPSS *for windows*. Teknik ini digunakan karena peneliti bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara simultan maupun parsial serta untuk mengetahui dan menganalisa variabel-variabel bebas yang berpengaruh dominan terhadap variabel terikat.

Model regresi analisis berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Penanaman Modal Asing

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X_1 = Kepemilikan Sertifikat Audit RSPO

X_2 = Kepemilikan Sertifikat Audit ISPO

e = Error

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis regresi linear berganda. Sebelum menganalisis dengan metode tersebut, harus dilakukan pengujian asumsi klasik. Pengujian ini mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Hal ini bertujuan agar hasil analisis dapat dikatakan akurat dan terhindar dari kekurangan-kekurangan tentang gejala asumsi klasik. Menurut Ghozali (2006) uji asumsi klasik yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Asumsi klasik yang pertama diuji adalah normalitas yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas data dilakukan dengan uji analisis grafis normal *probability plot*. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal tersebut. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Selanjutnya adalah uji statistik Kolmogorov-Smirnov yaitu jika nilai asymp sig 2 tailed kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak yang artinya data residual terdistribusi tidak normal namun apabila asymp sig 2 tailed lebih dari 0,05 maka H_0 diterima sehingga data residual terdistribusi normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas artinya terdapat varians variabel pada model regresi yang tidak konstan (sama), sebaliknya jika memiliki varians yang konstan disebut homokedastisitas. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi kenormalan residual, diantaranya metode *scatter plot* dan metode *glejser*. Pada metode *scatter plot*, residual dinyatakan menyebar normal apabila titik-titik residual pada gambar menyebar acak. Sedangkan pada metode *glejser*, residual dinyatakan normal atau memiliki ragam yang homogeny apabila sig. (probabilitas) pada masing-masing variabel bebas bernilai $> \alpha$ (5%).

3. Uji multikolinear

Uji multikolinear bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* atau *variance inflation factor* (VIF). Jika ada *tolerance* lebih dari 10% atau VIF kurang dari 10 maka dikatakan tidak ada multikolinearitas. *Tolerance* mengukur variabelitas variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *Tolerance* < 0.10 atau sama dengan nilai $VIF > 10$.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada

periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi, maka digunakan metode Durbin Watson (DW Test). Jika nilai Dw test sudah ada, maka nilai tersebut dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95%. Nilai tabel umumnya dapat digunakan untuk jumlah pengamatan sebanyak 15 sampai dengan 100 (Gujarati, 2003: 216)

- 1) Bila $dU < dw < (4-dU)$, maka tidak terjadi autokorelasi.
- 2) Bila $dw < d1$, maka terjadi autokorelasi positif.
- 3) Bila $dw > (4-dt)$, maka terjadi autokorelasi negatif.
- 4) Bila $d1 < dw < dU$ atau $(4-dU) < (4-dt)$, maka tidak dapat ditarik kesimpulan mengenai ada tidaknya autokorelasi.

Jika nilai Dw-test berada pada daerah ragu-ragu maka dapat dilakukan Runs-test untuk memastikan ada tidaknya autokorelasi. Jika tingkat signifikansi Runs-test $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

3.6 Koefisien Determinan

Uji Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikat. R^2 memiliki nilai antar 0 dan 1. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik model regresi yang terbentuk. Artinya keseluruhan variabel bebas secara bersama-sama mampu menerangkan variabel terikat. Koefisien determinasi

dibedakan menjadi R^2 dan R^2 yang disesuaikan (R^2_{adj}). R^2 nilainya akan berubah jika terdapat penambahan nilai variabel bebas, sedangkan R^2_{adj} nilainya lebih stabil.

Korelasi berganda (R) digunakan untuk mengetahui besar hubungan variabel bebas secara simultan dengan variabel terikat. Korelasi berganda (R) memiliki nilai antara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$). Dengan demikian semakin besar korelasi berganda yang dihasilkan maka semakin besar keeratan hubungan antara variabel bebas secara simultan dengan variabel terikatnya, sehingga model juga dikatakan semakin layak.

3.7 Hipotesa

3.7.1 Pengujian Hipotesis Pertama

Pengujian hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini yaitu diduga variabel kepemilikan sertifikat audit RSPO dan ISPO secara simultan berpengaruh signifikan terhadap iklim penanaman modal di sektor kelapa sawit di Indonesia dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Uji F statistic digunakan untuk menguji variabel bebas terhadap variabel terkait secara simultan atau serempak. Langkah-langkah dalam uji F:

1. Merumuskan Hipotesis

$$H_0 = \beta_1, \beta_2 = 0$$

Artinya variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

$$H_1 = \beta_1, \beta_2 \neq 0$$

Artinya variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat.

2. Menentukan tingkat signifikansi

Untuk menentukan nilai F statistic tabel dapat menggunakan tabel signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = (k - 1)$ dan $(n - k)$. n = jumlah observasi; k = jumlah variabel termasuk intersep.

3. Menghitung F_{hitung}

Menurut Gujarani (1999: 183) F_{hitung} dapat dicari dengan rumus sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / (k-1)}{1-R^2 / (n-k)}$$

Keterangan:

R^2 : koefisien determinan

k : banyak variabel bebas

n : banyaknya observasi

Untuk menentukan H_0 diterima atau ditolak adalah

Bila $F_{hitung} < F_{tabel}$ berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak

Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$ berarti H_1 diterima dan H_0 ditolak

3.7.2 Pengujian Hipotesis Kedua

Pengujian hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini yaitu diduga variabel kepemilikan sertifikat audit RSPO dan ISPO secara parsial berpengaruh

signifikan terhadap penanaman modal asing di sektor kelapa sawit di Indonesia dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Uji t statistik digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Langkah-langkah dalam uji t adalah:

1. Merumuskan hipotesis

$H_0 : b = 0$, berarti variabel X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel Y.

$H_1 : b \neq 0$, berarti variabel X secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y.

2. Menentukan tingkat signifikansi

Untuk menentukan nilai t statistic tabel dapat menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = (n - k)$ dan $(k - 1)$. n = jumlah observasi; k = jumlah variabel intersep.

3. Membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel}

Untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak adalah

Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$, berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$, berarti H_1 diterima dan H_0 ditolak.

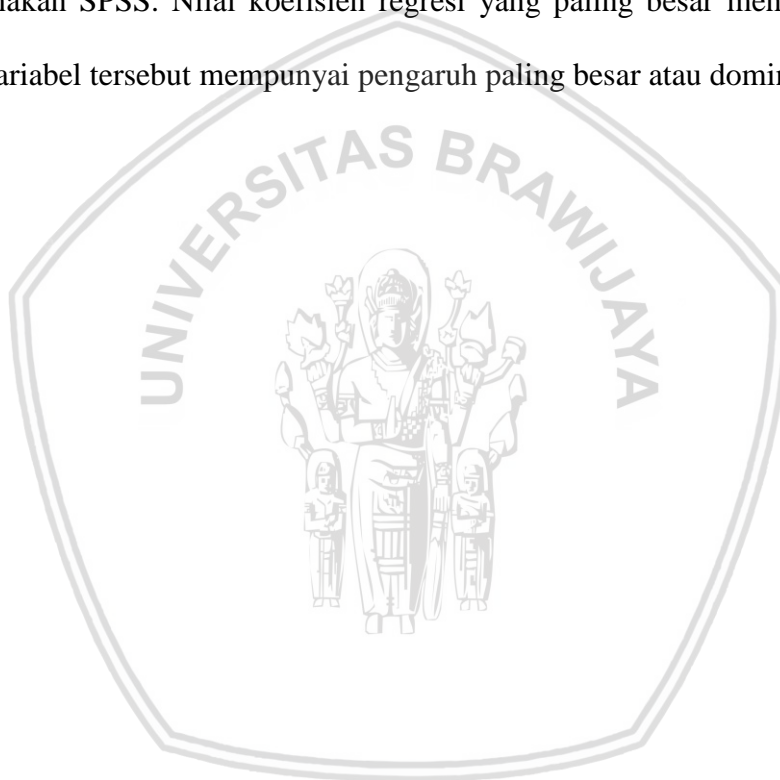
Atau berdasarkan signifikansi t:

Bila signifikansi $t_{hitung} > 0.05$, berarti H_0 diterima.

Bila signifikansi $t_{hitung} < 0.05$, berarti H_0 ditolak.

3.7.3 Pengujian Hipotesis Ketiga

Pengujian hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian ini yaitu diduga variabel kepemilikan sertifikat audit RSPO mempunyai pengaruh yang dominan terhadap penanaman modal di sektor kelapa sawit dengan meranking *standardized coefficients beta* yang diperoleh dari hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS. Nilai koefisien regresi yang paling besar mengindikasikan bahwa variabel tersebut mempunyai pengaruh paling besar atau dominan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dikenal juga sebagai analisis residual. Hal ini dikarenakan pengujian asumsi klasik seringkali dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran dengan mengamati pola nilai residual. Residual yang disebut juga error atau kesalahan didapatkan dari hasil pendugaan parameter analisis regresi, baik regresi linier sederhana, regresi linear berganda, dan sebagainya.

4.1.1 Uji Asumsi Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah residual yang telah distandarisasi pada model regresi menyebar normal atau tidak. Salah satu metode dalam uji asumsi normalitas adalah metode kolmogorov smirnov. Hasil pengujian dengan metode kolmogorov smirnov menunjukkan bahwa Asymp.Sig. (2-tailed) atau probabilitas sebesar $0,199 > 0,05$ maka dapat diambil keputusan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak atau dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1

Hasil Uji Normalitas Metode Kolmogrov Smirnov

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | Unstandardized Residual |
|------------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 10 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | 172934,447875 |
| Most Extreme Differences | | ,87 |
| | Absolute | ,217 |
| | Positive | ,217 |
| | Negative | -,188 |
| Test Statistic | | ,217 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,199 ^c |

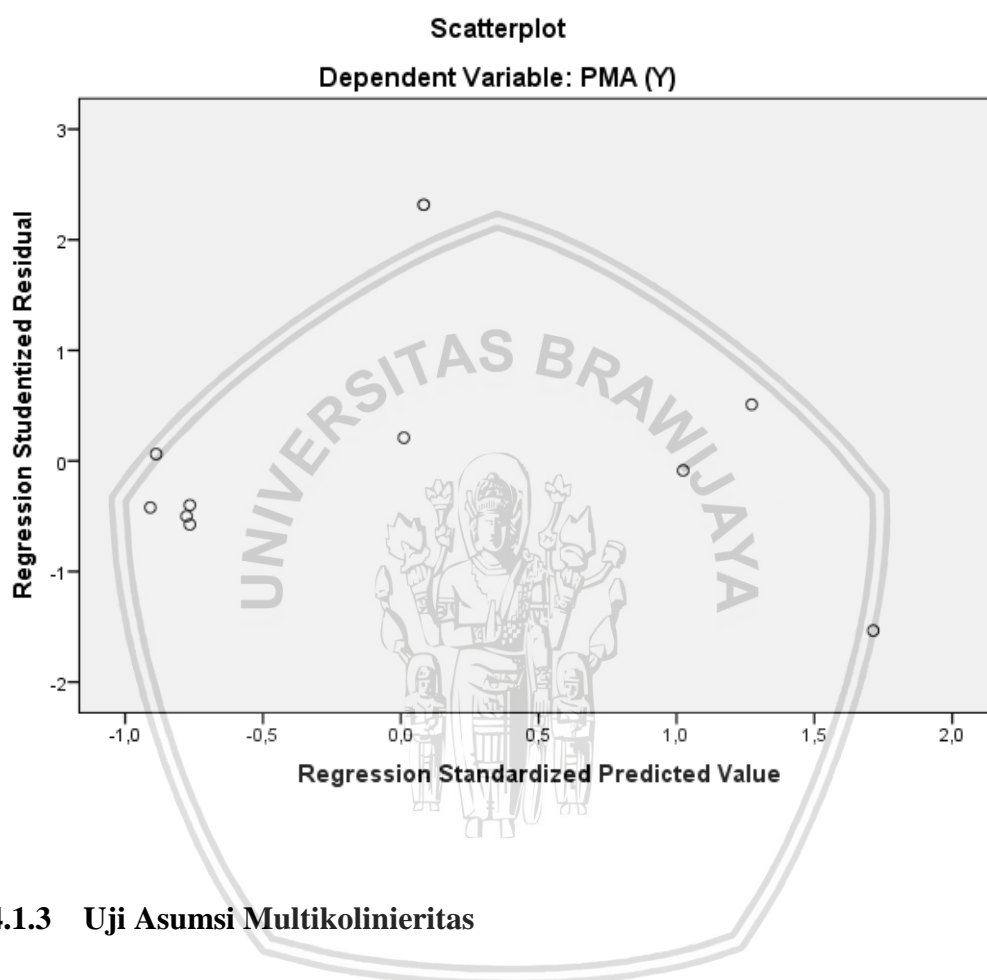
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

4.1.2 Uji Asumsi Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas artinya terdapat varians variabel pada model regresi yang tidak konstan (sama), sebaliknya jika memiliki varians yang konstan disebut homoskedastisitas. Agar model dapat dikatakan baik maka model regresi harus memenuhi homoskedastisitas. Salah satu metode dalam uji asumsi heteroskedastisitas adalah metode scatter plot. Hasil pengujian pada metode scatter plot menunjukkan bahwa titik-titik residual menyebar secara acak atau tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian dapat dinyatakan residual memiliki ragam yang homogen, sehingga dapat dinyatakan bahwa normal. Hasil uji tersebut dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini:

Gambar 4.1**Hasil Uji Heteroskedastisitas Metode Scatter Plot****4.1.3 Uji Asumsi Multikolinieritas**

Multokolineritas merupakan terjadinya korelasi linear yang mendekati sempurna antara dua atau lebih variabel independen. Uji multikolineritas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk erdapat korelasi sempurna atau tidak. Salah satu metode dalam uji asumsi multikolineritas adalah metode tolerance dan VIF. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara keseluruhan nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel bebas RSPO (X1)

dan ISPO (X2) tidak saling berkorelasi atau tidak terjadi multikolineritas. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.2 ini:

Tabel 4.2

Hasil Uji Multikolineritas Metode Tolerance dan VIF

| Coefficients ^a | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|----------------|------------|-------------|-------|------|--------------|------------|
| | | Unstandardized | | Standardize | | | Collinearity | |
| | | Coefficients | | d | | | Coefficients | Statistics |
| Model | | B | Std. Error | Beta | t | Sig. | Toleranc | e |
| 1 | (Constant) | 105237,259 | 123315,057 | | ,853 | ,422 | | |
| | RSPO (X1) | -2080,247 | 8756,644 | -,067 | -,238 | ,819 | ,901 | 1,110 |
| | ISPO (X2) | 5731,921 | 2213,140 | ,727 | 2,590 | ,036 | ,901 | 1,110 |

a. Dependent Variable: PMA (Y)

4.1.4 Uji Asumsi Autokorelasi

Autokorelasi merupakan hubungan antar residual suatu observasi. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara residual observasi yang satu dengan yang lainnya. Salah satu metode dalam uji asumsi autokorelasi adalah metode durbin watson. Kriteria pengujian apabila uji Durbin Watson (DW) berada pada nilai $dU - (4-dU)$ maka persamaan regresi tidak mengandung masalah autokorelasi. Dalam penilaian ini, kriteria DW dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3

Kriteria Durbin Watson (DW)

| Kriteria DW | | Kesimpulan |
|-------------------|-------------------|------------------------|
| $<dL$ | $<0,6972$ | Ada Autokorelasi |
| $dL - dU$ | $0,6972 - 1,6413$ | Tidak Ada Kesimpulan |
| $dU - (4-dU)$ | $1,6413 - 2,3587$ | Tidak Ada Autokorelasi |
| $(4-dU) - (4-dL)$ | $2,3587 - 3,3028$ | Tidak Ada Kesimpulan |
| $>(4-dL)$ | $>3,3028$ | Ada Autokorelasi |

Hasil pengujian metode ini dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini:

Tabel 4.4

Hasil Uji Autokorelasi Metode Durbin-Watson

| Model Summary ^b | | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | ,243 ^a | ,059 | -,075 | 181514,533680 74 | 2,117 |

a. Predictors: (Constant), ISPO (X2), RSPO (X1)

b. Dependent Variable: PMA (Y)

Berdasarkan hasil pengujian di atas terlihat nilai Durbin-Watson sebesar 2,117. Nilai tersebut berada dalam selang kriteria Dubin-Watson $dU - (4-dU)$. Dengan demikian tidak ada autokorelasi pada model regresi yang telah terbentuk.

4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. R^2 memiliki nilai antara 0-1 ($0 < R^2 < 1$). Apabila R^2 mendekati 1 berarti variabel independen semakin berpengaruh terhadap variabel dependen atau disebut semakin baik pula model regresi yang terbentuk.

Tabel 4.5

Hasil Uji Koefisien Determinasi dan Koefisien Korelasi Berganda

| Model Summary ^b | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | ,709 ^a | ,503 | ,361 | 196089,23237 |

a. Predictors: (Constant), ISPO (X2), RSPO (X1)

b. Dependent Variable: PMA (Y)

Berdasarkan hasil pengujian di atas terlihat nilai R Square (R^2) sebesar 0,503 (50,3%), artinya besarnya keragaman variabel Penanaman Modal Asing Sub Sektor Industri Minyak Kelapa Sawit (Y) yang dapat dijelaskan oleh variabel kepemilikan sertifikat RSPO (X1) dan kepemilikan sertifikat ISPO (X2) sebesar 36,1%. Sedangkan sisanya sebesar 63,9% merupakan kontribusi variabel lain yang tidak dalam model.

Dalam pengujian koefisien korelasi berganda dapat dilihat nilai R sebesar 0,709 menunjukkan hubungan yang cukup kuat antara variabel kepemilikan sertifikat RSPO (X1) dan kepemilikan sertifikat ISPO (X2) secara keseluruhan dengan variabel Penanaman Modal Asing Sub Sektor Industri Minyak Kelapa Sawit. Dengan demikian model dinyatakan sangat layak.

4.3 Model Persamaan Regresi

Untuk mengolah data dengan menggunakan regresi linear berganda dilakukan beberapa tahap untuk mencari hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, melalui hubungan variabel Kepemilikan Sertifikat RSPO (X1) dan Kepemilikan Sertifikat ISPO (X2) dengan Penanaman Modal Asing Sub Sektor Industri Minyak Kelapa Sawit (Y). Hasil regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6
Hasil Regresi

| Coefficients ^a | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | |
| 1 | (Constant) | 105237,259 | 123315,057 | | ,422 |
| | RSPO (X1) | -2080,247 | 8756,644 | -,067 | ,819 |
| | ISPO (X2) | 5731,921 | 2213,140 | ,727 | ,036 |

a. Dependent Variable: PMA (Y)

Berdasarkan hasil regresi berganda diatas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 105.237,259 - 2.080,247 + 5.731,921 + e$$

Nilai parameter konstanta sebesar 105237,259 menunjukkan apabila kepemilikan sertifikat RSPO dan ISPO bernilai konstan (tidak berubah), maka artinya penanaman modal asing sub sektor industri minyak kelapa sawit akan mengalami kenaikan sebesar 105.237,259. Nilai parameter atau koefisien regresi β_1 ini menunjukkan bahwa setiap variabel kepemilikan sertifikat RSPO (X1) meningkat sebesar 1%, maka penanaman modal asing sub sektor industri minyak

kelapa sawit akan mengalami penurunan sebesar 2.080,247% atau dengan kata lain setiap penurunan penanaman modal asing sub sektor industri minyak kelapa sawit dibutuhkan variabel kepemilikan RSPO sebesar 2.080,247% dengan asumsi variabel yang lain tetap atau konstan. Nilai parameter atau koefisien regresi β_2 ini menunjukkan bahwa setiap variabel kepemilikan sertifikat ISPO (X_2) meningkat sebesar 1%, maka penanaman modal asing sub sektor industri minyak kelapa sawit akan mengalami peningkatan sebesar 5731,921% dengan asumsi variabel yang lain tetap atau konstan.

4.4 Hasil Pengujian Hipotesis

4.4.1 Pengujian Hipotesis Pertama

Uji F dimaksudkan untuk melihat pengaruh secara simultan atau bersama variabel kepemilikan sertifikat RSPO dan ISPO terhadap Penanaman Modal Sub Sektor Industri Minyak Kelapa Sawit. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan skala probabilitas ;ima persen, jika probabilitas (signifikan) lebih besar dar α (0.05) maka variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel terikat, jika lebih kecil dari 0,05 maka variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel tidak terikat.

Dari hasil uji signifikansi simultan dapat dilihat bahwa F_{hitung} sebesar 3,539 sedangkan F_{tabel} sebesar 4,46, sehingga menghasilkan $F_{hitung} < F_{tabel}$. Probabilitas atau Sig. F sebesar 0,087, sedangkan nilai alpha sebesar 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas $>$ alpha, sehingga H_0 diterima. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh secara simultan

konstanta, variabel kepemilikan sertifikat RSPO dan ISPO terhadap penanaman modal asing sub sektor industri minyak kelapa sawit. Hasil uji ini dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini:

Tabel 4.7
Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

| ANOVA ^a | | | | | | |
|--------------------|------------|------------------|----|------------------|-------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 272129028858,381 | 2 | 136064514429,191 | 3,539 | ,087 ^b |
| | Residual | 269156909359,195 | 7 | 38450987051,314 | | |
| | Total | 541285938217,576 | 9 | | | |

a. Dependent Variable: PMA (Y)

b. Predictors: (Constant), ISPO (X2), RSPO (X1)

4.4.2 Pengujian Hipotesis Kedua

Uji t dimaksudkan untuk melihat pengaruh secara parsial atau sendiri variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan skala probabilitas lima persen, jika probabilitas (signifikan) lebih besar dari α (0,05) maka variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel terikat, jika lebih kecil dari 0,05 maka variabel bebas secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat. Hasil uji ini dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini:

Tabel 4.8

Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

| Coefficients ^a | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 105237,259 | 123315,057 | | ,853 | ,422 |
| RSPO (X1) | -2080,247 | 8756,644 | -,067 | -,238 | ,819 |
| ISPO (X2) | 5731,921 | 2213,140 | ,727 | 2,590 | ,036 |

a. Dependent Variable: PMA (Y)

Dari hasil uji signifikansi parsial diatas dapat disimpulkan pada masing-masing variabel sebagai berikut:

a. Kepemilikan Sertifikat RSPO

Perhitungan diatas menunjukkan nilai t pada variabel kepemilikan RSPO bernilai -0,238 dengan probabilitas sebesar 0,819 dengan nilai alpha sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas > alpha, sehingga H_0 diterima. Dengan demikian secara parsial kepemilikan sertifikat RSPO tidak berpengaruh terhadap penanaman modal asing sub sektor industri minyak kelapa sawit.

b. Kepemilikan Sertifikat ISPO

Perhitungan diatas menunjukkan nilai t pada kepemilikan sertifikat ISPO bernilai 2,590 dengan probabilitas sebesar 0,036 dengan nilai alpha 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas < alpha, sehingga H_0 ditolak. Dengan demikian secara parsial variabel kepemilikan sertifikat ISPO

berpengaruh signifikan terhadap penanaman modal asing sub sektor industri minyak kelapa sawit.

4.4.3 Pengujian Hipotesis Ketiga

Pengaruh dominan dapat dilihat melalui Standardized Coefficient paling besar. Pada tabel 4.8 dapat dilihat bahwa yang memiliki Standardized Coefficient paling besar adalah kepemilikan sertifikat ISPO dengan 0,727. Maka dapat disimpulkan variabel kepemilikan sertifikat ISPO yang memiliki pengaruh paling besar atau dominan.

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Variabel Kepemilikan Sertifikat RSPO terhadap Investasi Penanaman Modal Asing Sub Sektor Industri Minyak Kelapa Sawit

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan sertifikat RSPO tidak menentukan naik atau turunnya investasi penanaman modal asing sub sektor industri minyak kelapa sawit. Sertifikat yang akan diterima setelah dilakukan audit terhadap perusahaan kelapa sawit berdasarkan prinsip dan kriteria yang ditentukan organisasi RSPO ini, menjadi syarat bagi perusahaan yang akan mengekspor minyak kelapa sawit. Walaupun menjadi aturan yang berlaku internasional, ternyata tidak begitu berpengaruh untuk investasi penanaman modal di sub sektor industri minyak kelapa sawit di Indonesia.

Hal ini mendukung pendapat Alan M. Rugman (1981) yang menyatakan bahwa penanaman modal asing dipengaruhi oleh variabel

lingkungan, salah satu lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan pemerintah. Lingkungan pemerintah dapat menetapkan suatu ketentuan berupa aturan maupun insentif, dapat juga memberikan jaminan atas investor. Oleh karena itu, sertifikat audit RSPO yang bersifat sukarela tentu menjadi faktor negatif menurut teori ini.

Pengaruh Variabel Kepemilikan Sertifikat ISPO terhadap Investasi Penanaman Modal Asing Sub Sektor Industri Minyak Kelapa Sawit

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan sertifikat ISPO berpengaruh signifikan dan memiliki arah hubungan positif terhadap investasi penanaman modal asing di sub sektor industri minyak kelapa sawit. Jumlah kepemilikan sertifikat ISPO berasal dari jumlah perusahaan yang tersertifikasi selama tahun 2008-2017.

Kepemilikan sertifikat ISPO berpengaruh signifikan dan memiliki arah hubungan positif terhadap investasi penanaman modal asing sub sektor industri minyak kelapa sawit, karena perusahaan kelapa sawit diwajibkan untuk tersertifikasi ISPO oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia sehingga sifatnya mengikat dan memaksa. Hal ini juga mendukung pendapat David K. Eiteman (1989) bahwa motif investor menanamkan modal pada negara lain salah satunya adalah motif strategi. Motif strategi dibedakan menjadi mencari pasar, bahan baku, efisiensi produk, pengetahuan, dan keamanan. Adanya keterikatan dan peraturan serta sanksi yang jelas, mengurangi keraguan investor dalam berinvestasi secara langsung pada perusahaan minyak kelapa

sawit karena risiko adanya kegagalan karena kelalaian dan tentu investor akan merasa lebih aman untuk berinvestasi. Adanya rasa aman karena sertifikat audit ISPO merupakan kewajiban juga mendorong perusahaan industri minyak kelapa sawit melakukan audit ISPO untuk mendapatkan modal salah satunya dari investor asing. Namun begitu, masih terdapat variabel-variabel lain yang mempengaruhi penanaman modal asing pada sektor minyak kelapa sawit di Indonesia.

4.6 Implikasi Hasil Penelitian

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kepemilikan sertifikat ISPO berpengaruh dan memiliki arah hubungan positif terhadap investasi penanaman modal asing di sub sektor industri minyak kelapa sawit. Artinya semakin banyak perusahaan yang tersertifikasi ISPO maka akan semakin banyak pula investor yang berinvestasi secara langsung dari luar negeri. Adanya peraturan dan sanksi yang mewajibkan perusahaan kelapa sawit untuk tersertifikasi ISPO bisa jadi menjadi alasan dalam berinvestasi secara langsung untuk meningkatkan rasa aman dan menghindari adanya kerugian karena kelalaian.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepemilikan sertifikat RSPO tidak mempengaruhi investasi penanaman modal asing di sub sektor industri minyak kelapa sawit. Alasan yang memungkinkan hal tersebut terjadi karena sertifikasi RSPO bersifat sukarela dan tidak terdapat sanksi yang jelas untuk perusahaan yang tidak bersertifikat RSPO. RSPO bahkan dianggap hanya sebagai alat secara

teknis saja. Namun begitu, masih terdapat variabel-variabel lain yang mempengaruhi penanaman modal asing pada sektor minyak kelapa sawit di Indonesia.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang ada dan pembahasan dari hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepemilikan sertifikat RSPO dan ISPO tidak berpengaruh secara simultan terhadap investasi penanaman modal asing di sub sektor industri minyak kelapa sawit di Indonesia.
2. Kepemilikan RSPO tidak berpengaruh secara parsial terhadap investasi penanaman modal asing di sub sektor industri minyak kelapa sawit di Indonesia. Sedangkan kepemilikan sertifikat ISPO berpengaruh secara parsial terhadap investasi penanaman modal asing di sub sektor industri minyak kelapa sawit di Indonesia.
3. Faktor yang mempengaruhi secara dominan terhadap investasi penanaman modal asing di sub sektor industri minyak kelapa sawit di Indonesia adalah kepemilikan sertifikat ISPO.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, tentu hasil yang didapatkan tidaklah sempurna. Terdapat keterbatasan-keterbatasan dalam melakukan penelitian ini. Adapun keterbatasan-keterbatasan tersebut adalah:

1. Data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah data sekunder, oleh karena itu data didapatkan dari pihak lain. Data tidak secara langsung didapatkan karena adanya sistem yang harus diikuti sehingga memerlukan waktu yang cukup lama sampai data diperoleh.
2. Beberapa data sudah dapat diakses di *website* organisasi, namun tersusun berdasarkan huruf awal perusahaan sehingga peneliti harus merapikan kembali menjadi berurutan berdasarkan tanggal tersertifikasi.
3. Terdapat juga data yang hanya mengumpulkan nama perusahaan yang telah tersertifikasi saja namun tidak mencantumkan tanggal tersertifikasi sehingga peneliti harus lebih bekerja keras mencari tanggal tersertifikasi melalui internet ataupun telepon.

5.3 Saran untuk Penelitian Berikutnya

Adapun setelah melakukan penelitian ini, diharapkan dapat membantu penelitian berikutnya. Oleh karena itu, peneliti memberikan saran kepada peneliti berikutnya.

1. Sebelum melakukan penelitian, pastikan bahwa data yang akan diteliti memungkinkan untuk diperoleh dengan cara menghubungi terlebih dahulu pihak yang memiliki data. Hal ini memudahkan penelitian karena akan terdapat sistem dan ketentuan yang harus dilakukan sebelum meneliti.
2. Pastikan badan atau instansi yang akan dimintai data tidak lebih dari 2 saja karena peraturan untuk meminta surat pengantar penelitian hanya

diperbolehkan untuk 2 badan atau instansi, kecuali untuk badan atau instansi sejenis seperti Kantor Akuntan Publik (KAP).

3. Penelitian selanjutnya akan lebih baik jika menambahkan periode penelitian agar hasil yang didapatkan lebih dapat dipercaya. Selain itu, jika memungkinkan akan lebih baik menambahkan beberapa variabel lain yang berkemungkinan untuk diteliti.



DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------|-------------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR..... | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | ix |
| ABSTRAK | x |

| | |
|---------------------------------|----------|
| BAB I: PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 7 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 8 |

| | |
|---|-----------|
| BAB II: TELAAH PUSTAKA..... | 11 |
| 2.1 Pengertian dan Teori Penanaman Modal Asing..... | 11 |
| 2.1.1 Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA)..... | 11 |
| 2.1.2 Teori Penanaman Modal Asing | 13 |
| 2.2 Audit Lingkunga | 17 |
| 2.2.1 Pengertian Audit Lingkungan | 17 |
| 2.2.2 Jenis-jenis Audit Lingkungan | 17 |
| 2.3 <i>Roundtable on Sustainable Palm Oil</i> | 20 |

| | | |
|--|--|-----------|
| 2.3.1 | Visi dan Misi..... | 20 |
| 2.3.2 | Prinsip dan Kriteria RSPO | 21 |
| 2.4 | <i>Indonesia Sustainable Palm Oil</i> | 21 |
| 2.4.1 | Pengertian <i>Indonesia Sustainable Palm Oil</i> | 21 |
| 2.4.2 | Persyaratan ISPO | 22 |
| 2.5 | Kerangka Konseptual | 23 |
| 2.6 | Kerangka Pikir | 24 |
| 2.7 | Hipotesis..... | 25 |
| BAB III: METODE PENELITIAN..... | | 26 |
| 3.1 | Jenis Penelitian..... | 26 |
| 3.2 | Defenisi Operasional Variabel Penelitian | 26 |
| 3.2.1 | Variabel Dependen (Y) | 26 |
| 3.2.2 | Variabel Independen (X)..... | 27 |
| 3.3 | Populasi dan Sampel Penelitian | 27 |
| 3.4 | Jenis dan Sumber Data | 28 |
| 3.5 | Analisis Data | 28 |
| 3.5.1 | Metode Analisis | 28 |
| 3.5.2 | Uji Asumsi Klasik..... | 29 |
| 3.6 | Koefisien Determinan | 32 |
| 3.7 | Hipotesa..... | 33 |
| 3.7.1 | Pengujian Hipotesis Pertama | 33 |
| 3.7.2 | Pengujian Hipotesis Kedua | 34 |

| | | |
|-------|---------------------------------|----|
| 3.7.3 | Pengujian Hipotesis Ketiga..... | 36 |
|-------|---------------------------------|----|

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN37

| | | |
|-------|---|----|
| 4.1 | Hasil Uji Asumsi Klasik | 37 |
| 4.1.1 | Uji Asumsi Normalitas | 37 |
| 4.1.2 | Uji Asumsi Heteroskedastisitas | 38 |
| 4.1.3 | Uji Asumsi Multikolinieritas | 39 |
| 4.1.4 | Uji Asumsi Autokorelasi..... | 40 |
| 4.2 | Uji Koefisien Determinasi (R^2) | 42 |
| 4.3 | Model Persamaan Regresi..... | 43 |
| 4.4 | Hasil Pengujian Hipotesis | 44 |
| 4.4.1 | Pengujian Hipotesis Pertama | 44 |
| 4.4.2 | Pengujian Hipotesis Kedua..... | 45 |
| 4.4.3 | Pengujian Hipotesis Ketiga..... | 47 |
| 4.5 | Pembahasan Hasil Penelitian | 47 |
| 4.6 | Implikasi Hasil Penelitian | 49 |

BAB V: PENUTUP51

| | | |
|-----|--|----|
| 5.1 | Kesimpulan | 51 |
| 5.2 | Keterbatasan Penelitian..... | 51 |
| 5.3 | Saran untuk Penelitian Berikutnya..... | 52 |

DAFTAR PUSTAKA54



LAMPIRAN56



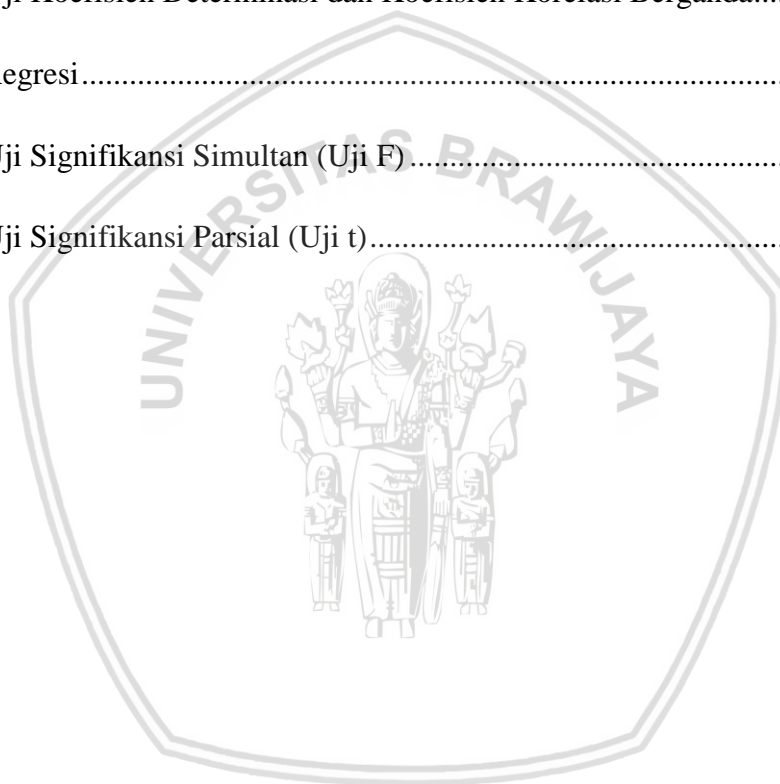
DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2015). *Statistik Kelapa Sawit Indonesia*. Jakarta: Pengarang.
- Bayangkara, IBK. (2015). *Audit Manajemen Prosedur dan Implikasi* (edisi 2). Jakarta: Salemba Empat.
- Eitemen, K., Arthur, L., & Michael H. (1989). *Multinational Bussiness Finance*. United State of America: Addition-Wesley Publishing Company, inc.
- Eka, E., Sakti, H., & Novia, D. (2015). Studi Komparatif Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Pola Plasma dan Pola Swadaya dalam Menghadapi Sertifikat RSPO di Desa Bukit Lembah Subur Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. *Jurnal Agribisnis*, 10(1), 81-83.
- Kansil. (1979). *Mendalami P4, UUD 1945*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 42 tahun 1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan. Diakses dari <http://www.hpli.org/reg/pm/Peraturan%20Lingkungan%20Hidup/Pedoman%20Umum%20Pelaksanaan%20Audit%20Lingkungan.pdf>
- Kertasapoetra, G. (1985). *Manajemen Penanaman Modal*. Bandung: Bina Aksara.
- Kertasapoetra, G. (2001). *Manajemen Penanaman Modal*. Bandung: Bina Aksara.
- Kuncora, M. (2007). *Metode Kuantitatif, Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 11 tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
- Rahayu, Ning. (2005). Kebijakan Investasi Asing (Foreign Direct Investmen) di Indonesia dan Vietnam. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi*, 13(1) (Januari).

- Roundtable on Sustainable Palm Oil. (2016). *Persyaratan dan Panduan Sistem Manajemen RSPO untuk Sertifikasi Kelompok dalam Produksi TBS*. Jakarta: Pengarang.
- Rugman, A., M. (1981). *Inside the Multinational: The Economics of Internal Market*. United State of America: Columbia University Press.
- Salim dan Budi Sutrisno. (2008). *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabet.
- Suharyadi dan Purwanti. (2015). *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan* (edisi 3). Jakarta: Salemba Empat.
- Sumantoro. (1987). *Kegiatan Perusahaan Multinasional: Problema Politik, Hukum, dan Ekonomi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gramedia.
- Sunny, Ismail. (1976). *Tinjauan dan Pembahasan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Umar, Husein. (2009). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (edisi 2). Jakarta: Rajawali Press.
- Wijaya, T. (2013). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Luas Area Perkebunan | 2 |
| Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas Metode Kolmogorov Smirnov..... | 38 |
| Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolineritas Metode Tolerance dan VIF..... | 40 |
| Tabel 4.3 Kriteria Durbin Watson (DW) | 41 |
| Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi Metode Durbin-Watson | 41 |
| Tabel 4.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi dan Koefisien Korelasi Berganda..... | 42 |
| Tabel 4.6 Hasil Regresi..... | 43 |
| Tabel 4.7 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)..... | 45 |
| Tabel 4.8 Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)..... | 46 |



LAMPIRAN 1

PRINSIP DAN KRITERIA RSPO

| Prinsip | Kriteria |
|---|---|
| Komitmen terhadap transparansi | Pihak perkebunana dan pabrik kelapa sawit memberikan informasi yang diperlukan kepada pihak lain menyangkut isu-isu lingkungan, sosial dan hukum yang relevan dengan kriteria RSPO dalam bahasa dan bentuk yang memadai, untuk memungkinkan adanya partisipasi efektif dalam pembuatan kebijakan. Indikator: permintaan informasi dan tanggapan yang diberikan harus tercatat dengan baik. |
| | Dokumen manajemen dapat diakses oleh publik, kecuali dicegah oleh aturan kerahasiaan dagang atau etika keterbukaan informasi akan berdampak negatif pada lingkungan sosial. Indikator: menyangkut dokumen manajemen mengenai isu-isu lingkungan, sosial, dan hukum. Dokumen tersebut seperti: status tanah/hak guna, kesehatan dan rencana keamanan, rencana-rencana dan analisa terkait dampak lingkungan sosial, rencana pencegahan polusi, detil keluhan dan penderitaan, prosedur negosiasi, dan rencana perbaikan kontinyu. |
| Memahami Hukum dan Peraturan yang Berlaku | Semua hukum dan peraturan berlaku/diratifikasi baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Indikator: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti telah memenuhi syarat hukum tertentu. 2. Sistem yang terdokumentasi, yang meliputi informasi tertulis persyaratan-persyaratan hukum. 1. Mekanisme untuk memastikan bahwa upaya memenuhi persyaratan-persyaratan hukum tersebut telah dilakukan. 2. Sistem untuk menelusuri perubahan- |

| | |
|-----------------------------|--|
| | <p>perubahan pada UU. Sistem yang digunakan untuk memahami dan menerapkan hukum harus sesuai dengan skala organisasi.</p> |
| | <p>Hak untuk menggunakan tanah dapat dibuktikan dan tidak dituntut secara sah oleh komunitas lokal dengan hak-hak yang dapat dibuktikan.</p> <p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen yang menunjukkan kepemilikan atau kontrak sewa yang sah. 2. Sejarah penguasaan tanah dan pemanfaatan tanah sesungguhnya yang sah. 3. Bila terdapat atau sudah terdapat perselisihan, tunjukkan bukti-bukti tambahan tentang akuisisi tanah dan kompensasi yang memadai kepada pemilik dan penghuni sebelumnya dan bukti-bukti bahwa semua telah diterima dengan baik lewat persetujuan tanpa paksaan. 4. Tidak ada konflik atas tanah yang serius, kecuali persyaratan-persyaratan untuk penyelesaian konflik yang dapat diterima semua pihak dilaksanakan dan disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat. |
| | <p>Penggunaan lahan untuk kelapa sawit tidak mengurangi hak legal, hak adat, atau hak guna dari pengguna-pengguna lain tanpa melakukan Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (KBDD).</p> <p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan tanah untuk kelapa sawit tidak menghilangkan hak legal maupun hak adat para pengguna lain tanpa adanya persetujuan tanpa paksa dari mereka. 2. Peta-peta yang menunjukkan wilayah-wilayah di bawah hak-hak adat diakui. 3. Salinan kesepakatan negosiasi tentang proses keluarnya persetujuan. |
| Komitmen terhadap kelayakan | Terdapat rencana manajemen yang |

| | |
|---|---|
| ekonomi dan keuangan jangka panjang | <p>diimplementasikan yang ditujukan untuk mencapai keamanan ekonomi dan keuangan dalam jangka panjang.</p> <p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen rencana usaha atau pengelolaan (minimal 3 tahun) 2. Adanya prosedur untuk mendapatkan informasi, teknik baru, dan mekanisme untuk menyebarluaskan informasi ini ke seluruh jajaran pekerja. Untuk organisasi dan skema pengolahan petani besar, prosedur ini harus didokumentasikan. |
| Penggunaan praktik terbaik tepat oleh perusahaan dan pabrik | <p>Prosedur operasi didokumentasikan secara tepat dan diimplikasikan lalu dipantau secara konsisten.</p> <p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme untuk memeriksa konsistensi implementasi prosedur. 2. Hasil-hasil terukur harus tercatat dengan baik. |
| | <p>Praktik-praktik mempertahankan kesuburan tanah sampai pada suatu tingkat atau jika memungkinkan, meningkatkan kesuburan tanah sampai pada tingkat yang dapat memastikan hasil optimum dan berkelanjutan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring tren kandungan senyawa organik tanah. 2. Monitoring input netto pupuk (<i>farm gate measures of exports vs penggunaan pupuk</i>). |
| | <p>Praktik-praktik meminimalisasi dan mengendalikan erosi dan degradasi tanah.</p> <p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring persentase permukaan tanah yang dilindungi dari dampak air hujan. 2. Monitoring persentase penanaman di lahan miring yang melebihi batasan tertentu (perlu monitoring yang spesifik tanah) 3. Adanya program pemeliharaan jalan. |
| | <p>Praktik-praktik mempertahankan kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air tanah.</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana pengelolaan air yang diterapkan 2. Monitoring limbah BOD. 3. Monitoring penggunaan air per ton dan TBS oleh pabrik. |
| | <p>Hama, penyakit, gulma dan spesies baru yang agresif dikelola secara efektif menggunakan teknik Pemberantasan Hama Terpadu (PHT) secara tepat.</p> |
| | <p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring unit level kandungan racun (toxicity unit) (a.i. x LD 50/TBS) 2. Monitoring luasan implementasi PHT/total Ha 3. Adanya program untuk monitoring hama dan penyakit. Karena masalah akurasi pengukuran, monitoring level kandungan racun pestisida tidak dapat diterapkan pada <i>smallholder</i>. |
| | <p>Bahan kimia pertanian digunakan dengan cara-cara tidak membahayakan kesehatan dan lingkungan. Tidak ada penggunaan bahan prophylactic, bahan kimia pertanian kategori Tipe 1A atau 1B WHO, atau bahan-bahan yang termasuk dalam Konvensi Stockholm dan Retterdam. Pihak perkebunan harus aktif melakukan upaya identifikasi bahan alternatif dan proses ini harus didokumentasikan.</p> |
| | <p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Justifikasi semua bahan-bahan kimia. 2. Catatan penggunaan pestisida (termasuk bahan aktif yang digunakan, daerah empat pestisida digunakan, jumlah yang digunakan per Ha dan jumlah penerapan). 3. Bukti-bukti dokumentasi yang menunjukkan bahwa bahan-bahan kimia yang dikategorikan sebagai Tipe 1A atau 1B WHO atau bahan-bahan yang termasuk dalam daftar Konvensi Stockholm dan Rotterdam, serta paraquat (sejenis |

| | |
|--|---|
| | <p>herbisida) dikurangi atau dihilangkan penggunaannya.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Penggunaan produk terpilih yang spesifik atas hama dan galma yang menjadi target, dan yang memiliki efek minimum terhadap spesies yang tidak menjadi target harus digunakan jika ada. Namun langkah-langkah untuk menghindari perkembangan resistensi (seperti rotasi pestisida) perlu digunakan.5. Bahan-bahan kimia hanya boleh digunakan oleh mereka yang memenuhi kualifikasi yang telah mendapatkan pelatihan terkait, dan harus selalu digunakan sesuai dengan spesifikasi produk. Fasilitas penyelamat yang memadai harus ada dan digunakan. Seluruh tindakan keamanan/darurat yang dianjurkan produk harus diperhatikan dengan cermat, diterapkan dan dipahami para pekerja.6. Penyimpanan seluruh bahan kimia harus memenuhi persyaratan Panduan Praktek FAO. Seluruh bahan kimia harus dibuang secara baik dan tidak digunakan untuk keperluan lain.7. Pemakaian pestisida lewat metode yang telah terbukti yang dapat meminimalisir resiko dan dampak. Penyemprotan pestisida lewat udara hanya diijinkan jika ada justifikasi yang terdokumentasi.8. Bukti tes residu CPO, sebagaimana diminta rantai pasokan.9. Pembuangan limbah yang baik, sesuai dengan prosedur yang sepenuhnya dipahami para pekerja dan pihak pengelola.10. Pemeriksaan kesehatan operator pestisida tiap tahun. <p>Rencana kesehatan dan keselamatan kerja dielaborasi, disebarluaskan dan diimplementasikan secara efektif.</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kebijakan kesehatan dan keamanan yang diimplementasikan dan dimonitori.2. Seluruh operasi terkait kesehatan dan keselamatan harus telah melewati analisa resiko, dan seluruh prosedur dan tindakan didokumentasikan dan diimplementasikan untuk mengatasi isu-isu teridentifikasi. Seluruh tindakan pengamanan yang dianjurkan produk perlu diperhatikan dengan baik dan diterapkan kepada pekerja terkait.3. Seluruh pekerja yang terlibat dalam operasi telah mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai praktek kerja yang aman. Peralatan perlindungan yang memadai harus tersedia bagi para pekerja di tempat kerja masing-masing untuk melakukan operasi-operasi yang dapat menimbulkan bahaya, seperti penggunaan pestisida, persiapan lahan, pemanenan, dan pembakaran jika ada.4. Orang yang bertanggung jawab harus diidentifikasi. Harus ada catatan tentang pertemuan berkala antara penanggung jawab dan para pekerja yang membicarakan masalah kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja.5. Tindakan-tindakan darurat dan penanganan kecelakaan harus ada dan seluruh petunjuknya harus dimengerti dengan baik oleh seluruh pekerja. Prosedur penanganan kecelakaan harus ditulis dalam bahasa yang dimengerti dengan baik oleh seluruh pekerja. Para pekerja yang telah mendapatkan pelatihan P3K harus berada dalam operasi di lapangan dan kebun lainnya, dan perlengkapan P3K harus berada di lokasi kerja. Catatan tentang kecelakaan yang terjadi harus disimpan |
|--|--|

| | |
|---|---|
| | <p>dengan baik dan secara periodik ditinjau ulang. Para pekerja harus dilindungi dengan asuransi kecelakaan.</p> <p>6. Pencatatan kecelakaan saat bekerja. Perhitungan yang dianjurkan: tingkat <i>Lost Time Accident</i> (LTA) baik dengan menyatakan batas maksimum yang dapat diterima atau kecenderungan penurunan.</p> <p>Seluruh staff, karyawan, petani dan kontraktor harus dilatih secara tepat.</p> <p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi besar memiliki program pelatihan formal yang meliputi analisa reguler terhadap kebutuhan-kebutuhan pelatihan dan dokumentasi program. 2. Catatan pelatihan bagi setiap karyawan. |
| <p>Tanggung jawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam serta keanekaragaman hayati</p> | <p>Aspek-aspek manajemen perkebunan dan pabrik yang menimbulkan dampak lingkungan diidentifikasi, dan rencana-rencana untuk mengurangi/mencegah dampak negatif dan mendorong dampak positif dibuat, diimplementasikan kemajuan yang kontinu.</p> <p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen analisa dampak 2. Perencanaan manajemen dan prosedur operasi yang tepat 3. Bila identifikasi dampak membutuhkan perubahan pada praktek-praktek yang sedang dijalankan untuk mengurangi dampak negatif, perlu dibuat sebuah jadwal perubahan. <p>Status spesies-spesies langka, terancam, atau hampir punah dan habitat dengan nilai konservasi tinggi, jika ada di dalam perkebunan atau yang dapat terpengaruh oleh manajemen kebun dan pabrik harus diidentifikasi dan konservasinya diperhatikan dalam rencana dan operasi manajemen.</p> <p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan daerah yang dilindungi dan |

| | |
|--|--|
| | <p>memungkinkan terkena dampak luar biasa dari kegiatan perkebunan atau pabrik.</p> <p>2. Status konservasi (misalnya status IUCN), perlindungan hukum, status populasi dan persyaratan habitat spesies langka, terancam atau hampir punah, yang mungkin terkena dampak luar biasa dari kegiatan perkebunan atau pabrik.</p> <p>3. Identifikasi habitat dengan nilai konservasi tinggi, seperti ekosistem yang langka dan terancam, yang mungkin terkena dampak luar biasa dari kegiatan perkebunan atau pabrik. Jika terdapat spesies langka atau terancam, atau habitat dengan nilai konservasi tinggi, maka langkah-langkah perencanaan manajemen dan operasi yang benar harus mencakup: memastikan bahwa seluruh persyaratan hukum yang terkait dengan perlindungan spesies atau habitat tersebut di atas dipenuhi, lalu menghindari kehancuran dan kerusakan atas habitat-habitat terkait dan mengontrol setiap kegiatan perburuan, penangkapan ikan atau pemanenan ilegal atau tidak benar dan mengembangkan upaya-upaya yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik antara manusia dan satwa liar (misalnya serbuan gajah ke wilayah pemukiman)</p> <p>Limbah harus dikurangi, didaur ulang, dipakai kembali, dan dibuang dengan cara-cara bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial.</p> <p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan limbah dan rencana pembuangan limbah. 2. Pembuangan wadah pestisida yang aman. <p>Efisiensi penggunaan energi dan penggunaan energi terbarukan dimaksimalkan.</p> <p>Indikator:</p> |
|--|--|

| | |
|---|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring penggunaan energi terbarukan per ton CPO/TBS 2. Monitoring penggunaan bahan bakar fosil per ton CPO (atau TBS jika perkebunan tidak memiliki pabrik) <p>Penggunaan pembakaran untuk pembuangan limbah dan untuk penyiapan lahan untuk penanaman kembali dihindari kecuali dalam kondisi spesifik, sebagaimana tercantum dalam kebijakan tanpa-bakar ASEAN atau panduan lokal serupa.</p> <p>Indikator: Dokumen analisa penggunaan pembakaran untuk persiapan lahan penanaman kembali.</p> <p>Rencana-rencana untuk mengurangi pencemaran dan emisi, termasuk gas rumah kaca, dikembangkan, diimplementasikan dan dimonitori.</p> <p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisa seluruh kegiatan yang menimbulkan polusi perlu dilakukan, termasuk emisi gas, emisi dan limbah arang. Polutan dan emisi dalam jumlah yang banyak harus diidentifikasi dan rencana-rencana untuk menguranginya diimplementasikan. 2. Sistem monitoring harus ada untuk masalah polutan yang banyak, yang melampaui batasan yang ditetapkan sistem nasional. 3. Monitoring gas metana hasil pemrosesan limbah dan partikel-partikel hasil pembakaran. Untuk ini mungkin dibutuhkan ketelibatan pihak ketiga. |
| <p>Pertimbangan bertanggung jawab atas karyawan, individu, dan komunitas yang terkena dampak perkebunan dan pabrik.</p> | <p>Aspek-aspek pengelola perkebunan dan pabrik yang menimbulkan dampak sosial diidentifikasi secara partisipatif dan rencana-rencana untuk mencegah dampak negatif dan untuk mendorong dampak positif.</p> <p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen analisa dampak sosial. |

| | |
|--|--|
| | <p>2. Bukti bahwa analisa telah dilakukan bersama pihak yang dirugikan. Partisipasi dalam konteks ini berarti bahwa pihak yang dirugikan dapat mengekspresikan pendapat dibuat, diimplementasikan dan dimonitor untuk memperlihatkan kemajuan yang berkesinambungan mereka lewat institusi perwakilan mereka selama proses identifikasi dampak, kajian temuan-temuan dan rencana pencegahan, dan monitoring keberhasilan rencana yang diimplementasikan.</p> <p>3. Jadwal yang disertai tanggung jawab pencegahan dan monitoring, dikaji dan diperbaharui sesuai kebutuhan, dalam kasus dimana analisa yang didapat menuntut dilakukannya perubahan pada praktek-praktek yang sedang dijalankan.</p> <p>4. Perhatian khusus terhadap dampak skema petani plasma (bila perkebunan menggunakan skema ini).</p> <p>Terdapat metode terbuka dan transparan untuk mengomunikasikan dan mengkonsultasikan antara perkebunan dan/atau pabrik, komunitas lokal, dan pihak lain yang dirugikan atau berkepentingan.</p> <p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen konsultasi dan prosedur komunikasi 2. Manajer yang dicalonkan untuk mempertanggungjawabkan isu-isu ini. 3. Pemeliharaan daftar <i>stakeholders</i>, catatan seluruh komunikasi dan catatan tanggapan-tanggapan terhadap masukan <i>stakeholders</i>. <p>Terdapat sistem yang disepakati dan didokumentasikan bersama untuk mengurus keluhan-keluhan dan penderitaan-penderitaan, yang diimplementasikan dan diterima oleh semua pihak.</p> <p>Indikator:</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem yang digunakan dapat menyelesaikan perselisihan lewat cara yang efektif, tepat waktu dan benar. 2. Dokumentasi proses dan hasil penyelesaian perselisihan 3. Sistem yang digunakan terbuka bagi seluruh pihak yang dirugikan <p>Setiap perundingan menyangkut kompensasi atas kehilangan hak legal atau hak adat dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang memungkinkan komunikasi adat dan <i>takeholder</i> lain memberikan pandangan melalui institusi perwakilan mereka sendiri.</p> <p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan prosedur untuk mengidentifikasi hak-hak legal, hak adat, dan prosedur untuk mengidentifikasi masyarakat yang berhak menerima kompensasi. 2. Prosedur untuk menghilangkan dan membagikan kompensasi yang memadai (dalam wujud uang atau bentuk lainnya) dibuat dan diimplementasikan. Hal ini perlu mempertimbangkan perbedaan jender dan wewenang mengklaim hak, kepemilikan dan akses kepada lahan; perbedaan antara transmigran dan masyarakat pribumi; perbedaan antara bukti kepemilikan yang legal versus komunal dari berbagai etnis. 3. Proses dan hasil setiap kompensasi didokumentasikan dan tersedia untuk umum. <p>Upah dan persyaratan-persyaratan bagi karyawan dan/atau karyawan dari kontraktor harus selalu memenuhi paling tidak standar minimum industri atau hukum, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan untuk memberikan pendapatan tambahan.</p> <p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentasi upah dan persyaratan 2. UU Ketenagakerjaan, kesepakatan Serikat |
|--|---|

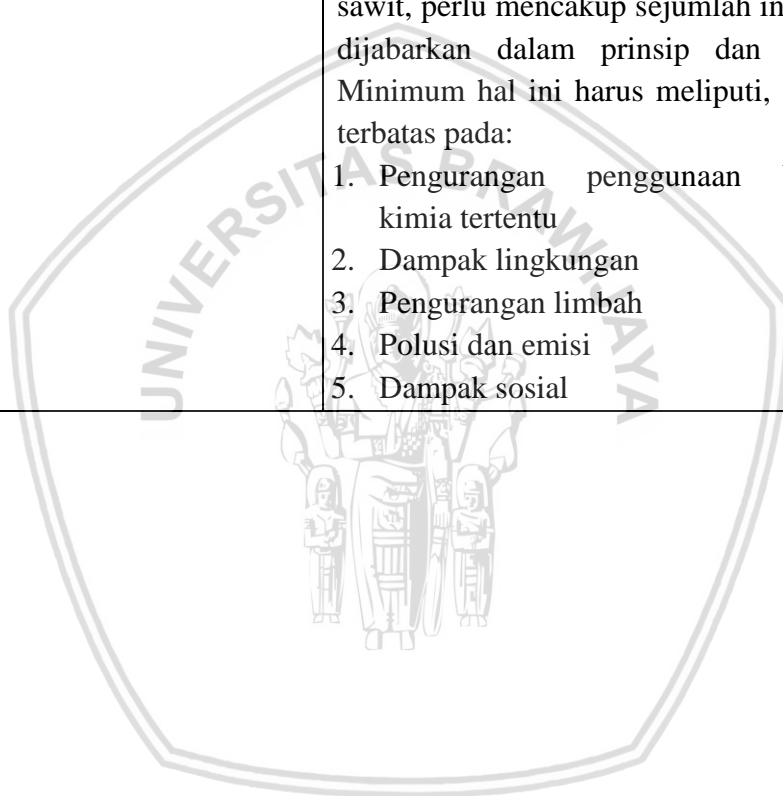
| | |
|--|--|
| | <p>Kerja atau kontrak langsung, penerimaan pekerja yang berisikan masalah pembayaran dan persyaratan kerja (misalnya jumlah jam kerja, deduksi, lembur, sakit, hari libur, cuti melahirkan, dasar-dasar pemutusan hubungan kerja, periode pemberitahuan, dll) tersedia dalam bahasa yang dimengerti oleh pekerja atau dijelaskan secara lengkap dan cermat kepada mereka oleh pejabat senior perusahaan.</p> <p>3. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit menyediakan fasilitas perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan yang memadai sesuai atau melebihi standar nasional, bila fasilitas umum serupa tersedia atau tidak dapat diakses oleh petani.</p> <p>Perusahaan menghormati hak seluruh karyawan untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja sesuai dengan pilihan mereka dan untuk mengeluarkan pendapat secara kolektif, ketika hak kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara kolektif dilarang oleh hukum, maka perusahaan memfasilitasi media asosiasi independen dan bebas mengeluarkan pendapat yang setara bagi seluruh karyawan.</p> <p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan yang diterbitkan dalam bahasa setempat dengan isi pengakuan atas hak berserikat. 2. Notulensi pertemuan dengan Serikat Kerja utama atau perwakilan kerja. <p>Buruh anak-anak tidak diperbolehkan. Anak-anak tidak boleh terpapar oleh kondisi kerja membahayakan. Pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak hanya diperbolehkan pada perkebunan keluarga, dibawah pengawasan orang dewasa dan tidak mengganggu program</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>pendidikan mereka.</p> <p>Indikator:</p> <p>Dokumen yang menyatakan bahwa persyaratan usia kerja minimum telah dipenuhi.</p> |
| | <p>Perusahaan tidak boleh terlibat atau mendukung diskriminasi berbasis ras, kasta, kebangsaan, agama, ketidakmampuan fisik, jender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik atau umur.</p> |
| | <p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pembukaan lapangan kerja yang terbuka untuk umum, termasuk identifikasi kelompok-kelompok setempat yang relevan atau yang dirugikan. 2. Bukti bahwa para pekerja dan kelompok pekerja termasuk tenaga kerja pendatang tidak diperlakukan secara diskriminatif. |
| | <p>Kebijakan untuk mencegah pelecehan seksual dan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan untuk melindungi hak reproduksi mereka dikembangkan dan diaplikasikan.</p> <p>Indikator:</p> <p>Kebijakan tentang pelecehan seksual dan kekerasan di tempat kerja dan catatan pelaksanaannya</p> |
| | <p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berurusan secara adil dan transparan dengan petani dan bisnis lokal lainnya</p> <p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harga TBS yang berlaku dan harga sebelumnya harus tersedia untuk umum. 2. Mekanisme penetapan harga TBS dan input/jasa harus didokumentasikan (bila hal ini berada dibawah kuasa pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit). 3. Bukti bahwa semua pihak memahami kesepakatan kontrak yang mereka lakukan, dan bahwa kontrak-kontrak tersebut adil, legal dan transparan. |

| | |
|---|--|
| Pengembangan perkebunan baru yang bertanggung jawab | 4. Pembayaran yang telah disepakati harus dilakukan tepat waktu. |
| | Perkebunan dan pabrik berkontribusi terhadap pembangunan lokal yang berkelanjutan sejauh memungkinkan. Indikator: Kontribusi nyata terhadap pembangunan lokal yang berdasarkan hasil konsultasi dengan masyarakat lokal. |
| | Suatu kajian lingkungan dan sosial yang komprehensif dan partisipatif dilakukan sebelum menetapkan suatu wilayah perkebunan atau operasi baru, atau perluasan kawasan sudah ada, dan hasilnya diintegrasikan ke dalam perencanaan, pengelolaan dan operasi. Indikator: 1. Analisa dampak independen yang dilakukan lewat metodologi partisipatif termasuk kelompok <i>stakeholder</i> luar. 2. Perencanaan manajemen dan prosedur operasi yang tepat. 3. Bila pengembangan meliputi skema dan implikasi pengelolaannya perlu diberikan perhatian khusus. |
| | Survei tanah dan informasi topologi digunakan untuk perencanaan lokasi kerja dalam rangka penetapan kawasan penanaman baru, dan hasilnya diintegrasikan ke dalam rencana dan operasi. Indikator: Kegiatan ini perlu dipadukan dengan SEIA. Penanaman baru sejak November 2005 (yang merupakan perkiraan saat pengadopsian kriteria RSPO oleh anggotanya) tidak menggantikan hutan alam atau kawasan yang memiliki satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi. Indikator: Kegiatan ini perlu dipadukan dengan SEIA |

| | |
|--|--|
| | <p>Penanaman ekstensif di lereng curam dan/atau tanah tidak subur dan rentan, dihindari.</p> <p>Indikator:</p> <p>Kegiatan ini perlu dipadukan dengan SEIA</p> |
| | <p>Tidak ada penanaman baru dilakukan di tanah masyarakat lokal tanpa persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC) dari mereka, yang dilakukan melalui suatu sistem yang terdokumentasi sehingga memungkinkan masyarakat adat dan masyarakat lokal serta para pihak lainnya bisa mengeluarkan pandangan mereka melalui institusi perwakilan mereka sendiri.</p> <p>Indikator:</p> <p>Kegiatan ini perlu dipadukan dengan SEIA</p> |
| | <p>Masyarakat lokal diberikan kompensasi untuk akuisisi tanah sudah disetujui dan dibebaskan dari pelepasan haknya dengan syarat harus melalui proses FPIC dan persetujuan yang telah disepakati.</p> <p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen identifikasi dan analisa hak-hak legal dan hak-hak adat. 2. Sistem identifikasi kelompok yang berhak menerima kompensasi 3. Sistem perhitungan dan distribusi kompensasi yang wajar (dalam wujud uang atau bentuk lainnya). 4. Masyarakat yang kehilangan akses dan hak atas tanah perluasan perkebunan diberikan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan perkebunan. 5. Proses dan hasil klaim kompensasi harus didokumentasikan dan disediakan untuk umum. 6. Kegiatan ini perlu dipadukan dengan SEIA |
| | <p>Penggunaan api dalam penyiapan penambahan baru dihindari kecuali dalam situasi tertentu, sebagaimana terdapat dalam panduan tanpa-bakar ASEAN maupun dalam praktik terbaik</p> |
| | |

| | |
|--|---|
| | <p>yang ada di regional.</p> <p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dokumentasi analisa penggunaan api untuk penyiapan lahan penanaman.2. Kegiatan ini perlu dipadukan dengan SEIA |
| Komitmen terhadap perbaikan terus-menerus pada wilayah-wilayah utama aktifitas | <p>Rencana aksi untuk perbaikan terus-menerus perlu didasarkan pada pertimbangan dampak sosial dan lingkungan serta kesempatan yang ditimbulkan perkebunan dan pabrik kelapa sawit, perlu mencakup sejumlah indikator yang dijabarkan dalam prinsip dan kriteria ini. Minimum hal ini harus meliputi, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengurangan penggunaan bahan-bahan kimia tertentu2. Dampak lingkungan3. Pengurangan limbah4. Polusi dan emisi5. Dampak sosial |



LAMPIRAN 2**KONDISI MASING-MASING VARIABEL**

| TAHUN | RSPO | ISPO | PMA (Ribuan USD) |
|--------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 2008 | 16 | 0 | 0 |
| 2009 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 5 | 0 | 9.168,5 |
| 2011 | 4 | 0 | 29.485,6 |
| 2012 | 28 | 5 | 81.816 |
| 2013 | 8 | 25 | 270.098,9 |
| 2014 | 13 | 29 | 675.221,2 |
| 2015 | 20 | 81 | 307.403,7 |
| 2016 | 10 | 64 | 533.520,8 |
| 2017 | 17 | 59 | 393.122,1 |

LAMPIRAN 3

HASIL ANALISIS REGRESI BERGANDA

Regression

Variables Entered/Removed^a

| Model | Variables Entered | Variables Removed | Method |
|-------|-----------------------------------|-------------------|--------|
| 1 | ISPO (X2), RSPO (X1) ^b | | Enter |

a. Dependent Variable: PMA (Y)

b. All requested variables entered.

Model Summary

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | ,709 ^a | ,503 | ,361 | 196089,23237 |

a. Predictors: (Constant), ISPO (X2), RSPO (X1)

ANOVA^a

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|-----------------|----|-----------------|-------|-------------------|
| 1 | Regression | 272129028858,38 | 2 | 136064514429,19 | 3,539 | ,087 ^b |
| | Residual | 269156909359,19 | 7 | 38450987051,314 | | |
| | Total | 541285938217,57 | 9 | | | |

a. Dependent Variable: PMA (Y)

b. Predictors: (Constant), ISPO (X2), RSPO (X1)

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 105237,259 | 123315,057 | | ,853 | ,422 |
| | RSPO (X1) | -2080,247 | 8756,644 | -,067 | -,238 | ,819 |
| | ISPO (X2) | 5731,921 | 2213,140 | ,727 | 2,590 | ,036 |

a. Dependent Variable: PMA (Y)

Coefficients^a

| Model | | Collinearity Statistics | |
|-------|------------|-------------------------|-------|
| | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | | |
| | RSPO (X1) | ,901 | 1,110 |
| | ISPO (X2) | ,901 | 1,110 |

a. Dependent Variable: PMA (Y)

Coefficient Correlations^a

| Model | | | ISPO (X2) | RSPO (X1) |
|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 1 | Correlations | ISPO (X2) | 1,000 | -,315 |
| | | RSPO (X1) | -,315 | 1,000 |
| | Covariances | ISPO (X2) | 4897987,980 | -6094980,550 |
| | | RSPO (X1) | -6094980,550 | 76678815,961 |

a. Dependent Variable: PMA (Y)

Collinearity Diagnostics^a

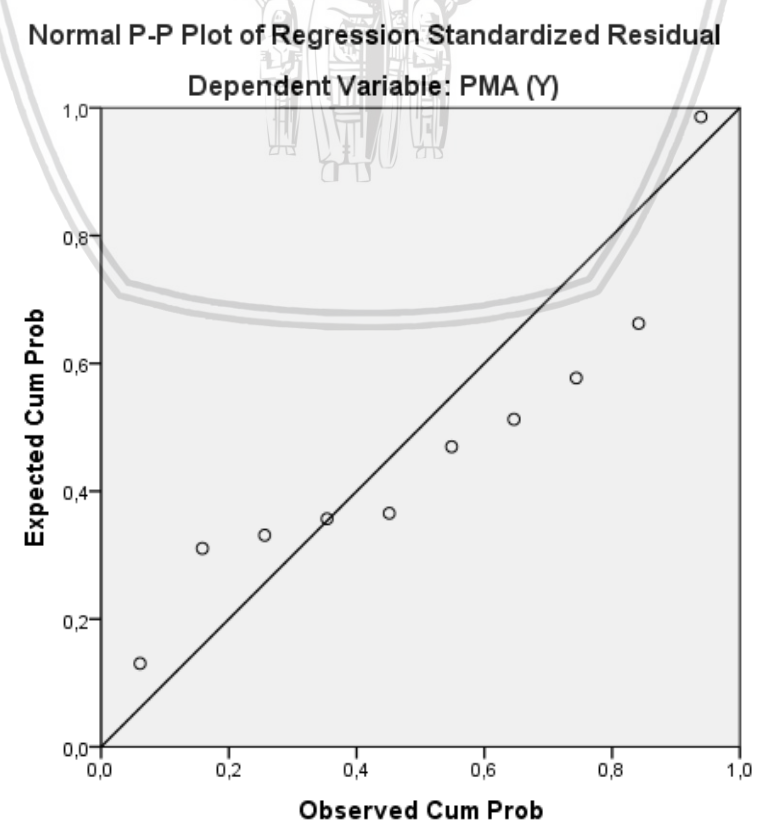
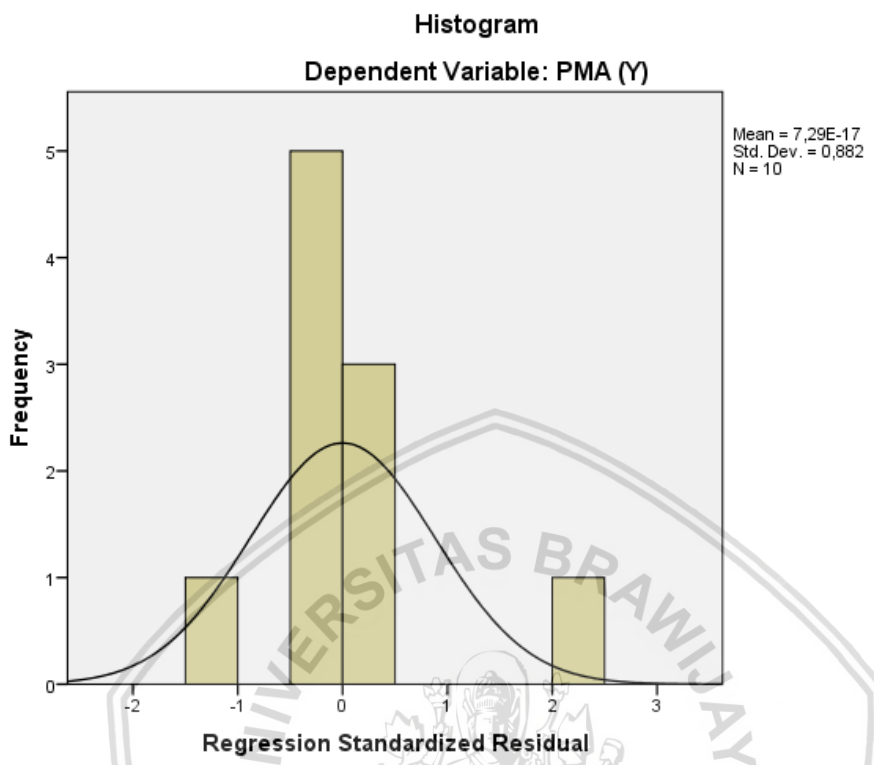
| Model | Dimension | Eigenvalue | Condition Index | Variance Proportions | | |
|-------|-----------|------------|-----------------|----------------------|-----------|-----------|
| | | | | (Constant) | RSPO (X1) | ISPO (X2) |
| 1 | 1 | 2,481 | 1,000 | ,04 | ,03 | ,06 |
| | 2 | ,379 | 2,557 | ,12 | ,07 | ,93 |
| | 3 | ,140 | 4,206 | ,84 | ,89 | ,01 |

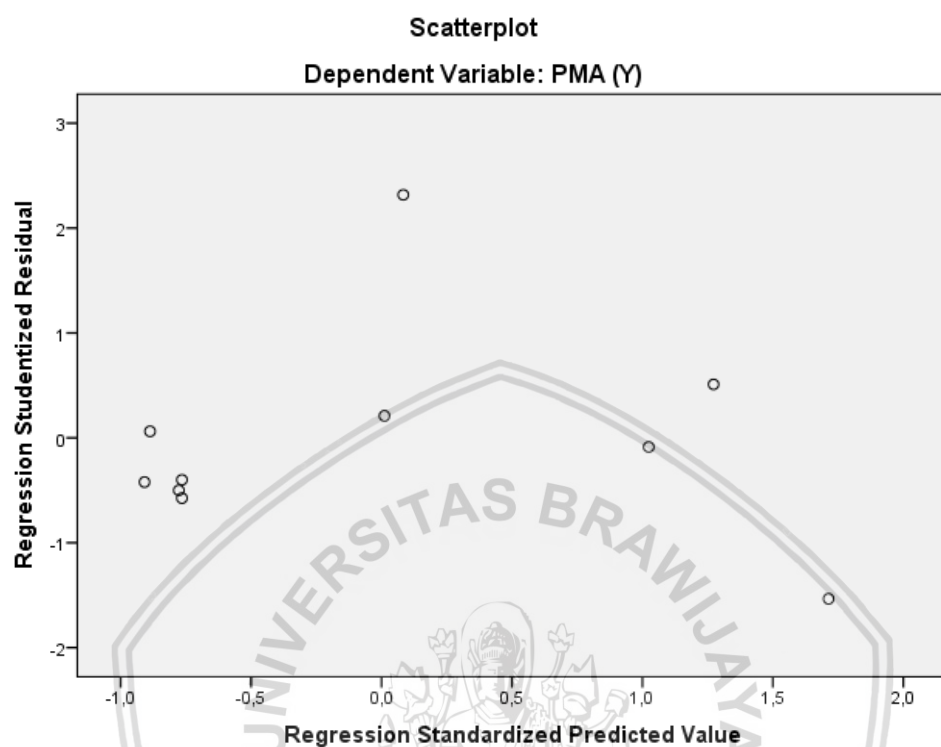
a. Dependent Variable: PMA (Y)

Residuals Statistics^a

| | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation | N |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|----|
| Predicted Value | 71953,3047 | 527917,8750 | 229983,6800 | 173886,62617 | 10 |
| Std. Predicted Value | -,909 | 1,713 | ,000 | 1,000 | 10 |
| Standard Error of Predicted Value | 62317,883 | 168860,500 | 103572,073 | 29965,198 | 10 |
| Adjusted Predicted Value | 57956,8555 | 718238,9375 | 249085,8861 | 206461,63003 | 10 |
| Residual | -220514,1875 | 430801,46875 | ,00000 | 172934,44788 | 10 |
| Std. Residual | -1,125 | 2,197 | ,000 | ,882 | 10 |
| Stud. Residual | -1,535 | 2,317 | -,042 | ,997 | 10 |
| Deleted Residual | -410835,21875 | 479200,28125 | -19102,20614 | 225989,09731 | 10 |
| Stud. Deleted Residual | -1,745 | 4,444 | ,157 | 1,621 | 10 |
| Mahal. Distance | ,009 | 5,774 | 1,800 | 1,651 | 10 |
| Cook's Distance | ,001 | ,678 | ,103 | ,210 | 10 |
| Centered Leverage Value | ,001 | ,642 | ,200 | ,183 | 10 |

a. Dependent Variable: PMA (Y)





One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 10 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | 172934,447875 |
| Most Extreme Differences | | ,87 |
| | Absolute | ,217 |
| | Positive | ,217 |
| | Negative | -,188 |
| Test Statistic | | ,217 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,199 ^c |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Nelda Bulan Porari Br Ginting
Tempat, tanggal lahir : Perawang, 17 Agustus 1995
NIM : 145020301111006
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

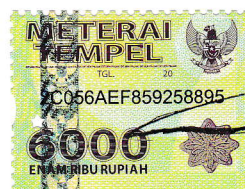
Pengaruh Jumlah Kepemilikan Sertifikat Audit RSPO dan ISPO dengan Iklim Investasi Penanaman Modal Asing Sub Sektor Industri Minyak Kelapa Sawit

yang saya tulis adalah benar benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 9 April 2018



Nelda Bulan Porari Br Ginting

145020301111006

RIWAYAT HIDUP

Nama : Nelda Bulan Porari Br Ginting
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Perawang, 17 Agustus 1995
Agama : Kristen
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Km. 15 Perawang Barat, Kab. Siak, Riau.
Alamat Email : neldaaginting@gmail.com

Pendidikan Formal:

Sekolah Dasar 2001-2003 : SDN 023 Tualang
2003-2008 : SDS Marsudirini Santa Maria
SMP 2008-2011 : SMP Putri Cahaya
SMA 2011-2014 : SMA Santo Thomas 1
Perguruan Tinggi 2014-2018 : S1 Akuntansi, Universitas Brawijaya

Pendidikan Non Formal:

Pelatihan Pasar Modal “Capital Market Academy” di Universitas Brawijaya : Tahun 2015
Pelatihan Perpajakan Brevet A & B di Universitas Brawijaya : Tahun 2018

PENGALAMAN ORGANISASI

2013-2014 : Anggota Kewirausahaan Pemuda GJAI Wilayah Deli Serdang
2015-2016 : Anggota Divisi Fasilitator dan Aplikator PMK Maleakhi, FEB, UB
2016-2017 : Kordinator Divisi Fasilitator dan Aplikator PMK Maleakhi, FEB, UB

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| 2.1 Kerangka Konseptual..... | 23 |
| 2.2 Kerangka Pikir | 24 |
| 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas Metode Scatter Plot..... | 39 |

